



PrADa

Profil dan Analisis Daerah

**Provinsi:
NUSA TENGGARA TIMUR, 2017**

Kedeputan Bidang
Pengembangan Regional

Tim Penyusun



Penanggung Jawab:
Ir. Rudy S. Prawiradinata, MCRP, Ph.D
Deputi Bidang Pengembangan Regional



Ketua Tim Pelaksana:
Drs. Oktorialdi, MA, Ph.D
Direktur Pengembangan Wilayah
dan Kawasan



Anggota Tim Pelaksana:
Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM
Direktur Perkotaan, Perumahan dan
Permukiman



Anggota Tim Pelaksana:
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D
Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi
dan Perdesaan



Anggota Tim Pelaksana:
Ir. Aryawan Soetiarso Poetro, MSI
Direktur Otonomi Daerah



Anggota Tim Pelaksana:
Uke Muhammad Hussein, SSI, MPP
Direktur Tata Ruang dan Pertanahan

**Kedeputan Bidang
Pengembangan Regional**

Kata Pengantar



Di samping pertumbuhan (*growth*), keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara juga diukur melalui dimensi pemerataan (*equality*). Pembangunan yang semata-mata mengejar pertumbuhan diyakini akan menghasilkan berbagai kesenjangan atau ketimpangan, baik dalam bentuk kesenjangan dalam kesejahteraan individual masyarakat (antara kelompok kaya dengan kelompok miskin) maupun dalam bentuk kesenjangan antardaerah atau ketimpangan wilayah. Kesenjangan wilayah itu sendiri dapat diidentifikasi dalam berbagai manifestasi. Oleh sebab itu dalam ilmu kewilayahan dikenal berbagai macam kesenjangan, misalnya kesenjangan yang dilatarbelakangi perbedaan aktivitas ekonomi seperti antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan, kesenjangan yang dipengaruhi faktor kondisi alam seperti antara wilayah pesisir dengan wilayah pedalaman, atau kesenjangan yang terjadi akibat faktor administratif seperti kesenjangan antar provinsi dan kesenjangan antar kabupaten/kota.

Dalam konteks Indonesia, kesenjangan antarwilayah menjadi fokus utama dalam kerangka pembangunan wilayah. Hal ini dapat dilihat di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, dimana disebutkan bahwa arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan pada upaya untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI), yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

Selanjutnya dalam perspektif pembangunan wilayah, upaya untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah tidak dapat dilakukan hanya dengan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, akan tetapi lebih jauh dari pada itu yakni pentingnya untuk memperhatikan faktor-faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri, seperti pendidikan, kesehatan, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran serta ketersediaan infrastruktur pendukung wilayah lainnya. Faktor-faktor tersebut, merupakan kunci utama bagi daerah dalam upaya mengejar ketertinggalan dengan daerah lainnya, terlepas dari adanya perbedaan *resources* yang dimiliki oleh masing-masing wilayah.

Profil dan Analisis Daerah (PrADa) yang disusun ini dapat menjadi salah satu referensi bagi para pemangku kepentingan pembangunan dalam upaya mengurangi tingkat kesenjangan pembangunan antarwilayah, melalui program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan daerah dengan fokus utama pada aspek pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, perumahan dan permukiman, ketahanan pangan, ketahanan energi, infrastruktur, industri dan pariwisata.

Jakarta, Desember 2017
Deputi Bidang Pengembangan
Regional,

Rudy S. Prawiradinata

**Kedeputan Bidang
Pengembangan Regional**



DAFTAR ISI**KATA PENGANTAR****DAFTAR ISI**

Bab-1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan	4
1.3. Manfaat	5
Bab-2 METODOLOGI	6
2.1. Lingkup Kegiatan	7
2.2. Metode Analisis	7
Bab-3 PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO REGIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	11
3.1. Perkembangan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur	12
3.2. Tingkat Kemiskinan	16
3.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	18
3.4. Perkembangan Dana Desa	20
Bab-4 PrADa PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	24
4.1. Tematik Pendidikan	27
4.2. Tematik Kesehatan	35
4.3. Tematik Penanggulangan Kemiskinan	43
4.4. Tematik Perumahan dan Permukiman	50
4.5. Tematik Ketahanan Pangan	60
4.6. Tematik Ketahanan Energi	69
4.7. Tematik Infrastruktur	77
4.8. Tematik Industri, Pariwisata, dan Sektor Unggulan	84
Bab-5 PENUTUP	90
5.1. Kesimpulan	91
5.2. Rekomendasi	91



Bab-1

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Di samping pertumbuhan (*growth*), keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara juga diukur melalui dimensi pemerataan (*equality*). Pembangunan yang semata-mata mengejar pertumbuhan diyakini akan menghasilkan berbagai kesenjangan atau ketimpangan, baik dalam bentuk kesenjangan dalam kesejahteraan individual masyarakat (antara kelompok kaya dengan kelompok miskin) maupun dalam bentuk kesenjangan antar-daerah atau ketimpangan wilayah. Berkaitan dengan itu, menurut Sumitro Djojohadikusumo, dua dari tiga masalah pembangunan jangka panjang Indonesia adalah bersangkutan dengan masalah ketimpangan atau kesenjangan, yaitu ketimpangan pada perimbangan kekuatan di antara golongan-golongan masyarakat dan ketidakseimbangan ekonomi antar-daerah. Satu masalah lainnya adalah persoalan lapangan kerja produktif dan pengangguran (Djojohadikusumo, 1994:191). Maka dapat dipahami jika masalah ketimpangan atau kesenjangan antar-daerah selalu menjadi salah satu isu utama pembangunan daerah di Indonesia.

Kesenjangan dalam perkembangan ekonomi adalah merupakan suatu keniscayaan, baik dalam tataran antar-negara maupun antar-daerah di suatu negara. Fenomena kesenjangan terjadi karena adanya perbedaan dalam alokasi berbagai faktor pertumbuhan ekonomi. Hirschman melihat bahwa kesenjangan bukan hanya terjadi dalam perkembangan ekonomi antar-negara, tetapi terjadi juga kesenjangan dalam perkembangan wilayah. Jika di dunia ini terdapat negara-negara maju dan negara-negara terbelakang, maka dalam suatu negara pun terdapat wilayah-wilayah yang maju dan wilayah-wilayah yang terbelakang (Nurzaman, 2002:91).

Kesenjangan wilayah itu sendiri dapat diidentifikasi dalam berbagai manifestasi. Oleh sebab itu dalam ilmu kewilayahan dikenal berbagai macam kesenjangan, misalnya kesenjangan yang dilatarbelakangi perbedaan aktivitas ekonomi seperti antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan, kesenjangan yang dipengaruhi faktor kondisi alam seperti antara wilayah pesisir dengan wilayah pedalaman, atau kesenjangan yang terjadi akibat faktor administratif seperti kesenjangan antar provinsi dan kesenjangan antar kabupaten/kota dan seterusnya. Dalam kerangka yang lebih luas, kesenjangan yang terjadi di Indonesia, khususnya antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) lebih dilatarbelakangi oleh hampir seluruh perbedaan tersebut, yaitu aktivitas ekonomi, kondisi alam dan juga administratif.

Asal dari kesenjangan antar-daerah atau kesenjangan wilayah menurut Myrdal berakar pada persoalan non ekonomi dan berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif ini mendorong terpusatnya pembangunan pada wilayah-wilayah yang memberikan harapan laba yang tinggi, sedangkan wilayah-wilayah yang tidak menjanjikan laba yang tinggi akan tetap terbelakang atau mengalami stagnasi (Myrdal dalam Roudo, 2004:25).

Banyak sekali teori dan konsep yang berusaha menjelaskan mekanisme terjadinya kesenjangan serta mekanisme untuk mengurangi kesenjangan itu. Teori *polarization effect* misalnya menjelaskan kecenderungan semakin besarnya kesenjangan akibat terjadinya aliran faktor produksi dari wilayah yang terbelakang ke wilayah maju, sementara teori *trickling down effect* menjelaskan kecenderungan kesenjangan yang semakin mengecil karena berpindahnya sumber daya (terutama modal) ke wilayah yang terbelakang akibat sudah tidak efisiennya lagi ekonomi di wilayah yang sudah maju. Dalam konsep yang lain namun masih dalam gagasan yang sama, fenomena membesarnya kesenjangan disebut sebagai akibat dari terjadinya *backwash effect*, sedangkan fenomena mengecilnya kesenjangan adalah akibat terjadinya *spread effect*. Pandangan optimis diwakili oleh Hirschman yang berpendapat bahwa pada suatu saat *trickling down effect* akan bekerja lebih kuat daripada *polarization effect* (sehingga kesenjangan akan berkurang), sementara Myrdal mewakili pandangan yang lebih pesimis karena menurutnya *backwash effect* akan selalu lebih besar daripada *spread effect* (yang artinya kesenjangan akan cenderung semakin besar).

Jadi permasalahannya meskipun kesenjangan adalah suatu keniscayaan dalam perkembangan wilayah, namun kecenderungan semakin membesarnya kesenjangan (divergensi) atau semakin mengecilnya kesenjangan (konvergensi) selalu menjadi bahan kajian yang menarik. Kuznets yang merupakan pelopor dalam analisis empirik terhadap pola-pola pertumbuhan historis di negara-negara maju, menemukan bahwa pada tahap-tahap awal pertumbuhan distribusi pendapatan akan cenderung memburuk, tetapi akan membaik pada tahap-tahap berikutnya. Observasi inilah yang dikenal luas sebagai konsep kurva U-terbalik dari Kuznets (Kuncoro, 2004:129).

Pada tingkat wilayah atau regional, adalah Williamson yang mencoba memahami fenomena divergensi dan konvergensi wilayah secara empirik, yaitu dengan mengamati tingkat kesenjangan di berbagai negara yang mempunyai tingkat perkembangan (dinyatakan dengan PDRB) yang berbeda (Nurzaman, 2002:95). Williamson menemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas atau kesenjangan regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu. Namun pada tahap pertumbuhan ekonomi yang lebih matang, tampak adanya keseimbangan antar-daerah dan disparitas berkurang secara signifikan (Kuncoro, 2004:133). Dapat dikatakan bahwa Williamson adalah yang pertama kali secara eksplisit memberi dimensi spasial kepada kurva U-terbaliknya Kuznets, yaitu dengan tidak memfokuskan kepada kesenjangan pendapatan rumah tangga melainkan kepada kesenjangan antar-wilayah di tingkat pendapatan perkapita.

Dalam konteks Indonesia, kesenjangan antarwilayah menjadi fokus utama dalam kerangka pembangunan wilayah. Hal ini dapat dilihat di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, dimana disebutkan bahwa arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan pada upaya untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

Transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah tersebut bertumpu pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, efisiensi dan nilai tambah sumber daya alam, penguatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, penyediaan infrastruktur yang terpadu dan merata dengan memperhatikan posisi geo-strategis regional dan global yang memanfaatkan secara optimal keberadaan *Sea Lane of Communication* (SLoC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Sejalan dengan upaya pemerintah untuk dapat mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah, harus dapat didukung dengan program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan pembangunan dimasing-masing daerah. Hal ini mengingat bahwa, masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan oleh karenanya dalam menyusun usulan program/kegiatan yang akan dirumuskan tidak dapat disamaratakan (simetris) dan harus menggunakan pendekatan yang berbeda untuk setiap daerah (asimetris).

Selanjutnya untuk dapat menyusun program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan daerah, dibutuhkan kajian yang mendalam dan komprehensif untuk masing-masing daerah, khususnya yang terkait dengan indikator utama pembangunan daerah baik melalui pendekatan statistik maupun spasial. Sejalan dengan hal tersebut, Kedepatian Bidang Pengembangan Regional, telah melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksudkan di atas, dan untuk selanjutnya hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka merumuskan program/kegiatan yang paling sesuai dengan isu atau permasalahan daerah.

2.2. Tujuan

- (1). Mengumpulkan dan menganalisis data-data statistik yang terkait dengan indikator utama pembangunan daerah, baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder;
- (2). Memetakan data-data yang diperoleh dari hasil analisis statistik/tabular ke dalam bentuk *Geographic Information System* (GIS);
- (3). Melaksanakan FGD dengan daerah, tujuannya adalah untuk mengetahui berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, khususnya yang terkait dengan tematik pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, perumahan dan permukiman, ketahanan pangan, ketahanan energi, infrastruktur, industri dan pariwisata.
- (4). Melaksanakan konsinyiring/*workshop* di pusat (Jakarta), tujuannya adalah untuk memperoleh berbagai masukan/saran untuk penyempurnaan penyusunan PrADa, termasuk membahas hasil-hasil pelaksanaan FGD di daerah;
- (5). Menyusun rekomendasi kebijakan dalam bentuk indikasi program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan daerah;
- (6). Menyusun laporan PrADa dalam rangka, yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka mempertajam perencanaan pembangunan nasional yang berbasis kewilayahan.

1.3. Manfaat

Manfaat dari terlaksana dan tersusunnya PrADa ini, bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk mensinergikan pelaksanaan pembangunan nasional/daerah, serta untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan utamanya dalam menyusun program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan daerah. Disamping itu model analisis melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) yang dipergunakan dalam kegiatan penyusunan PrADa ini dapat menjadi salah satu instrumen dalam rangka mempersiapkan penyusunan *background study* RPJMN 2020-2024, yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

Bab-2

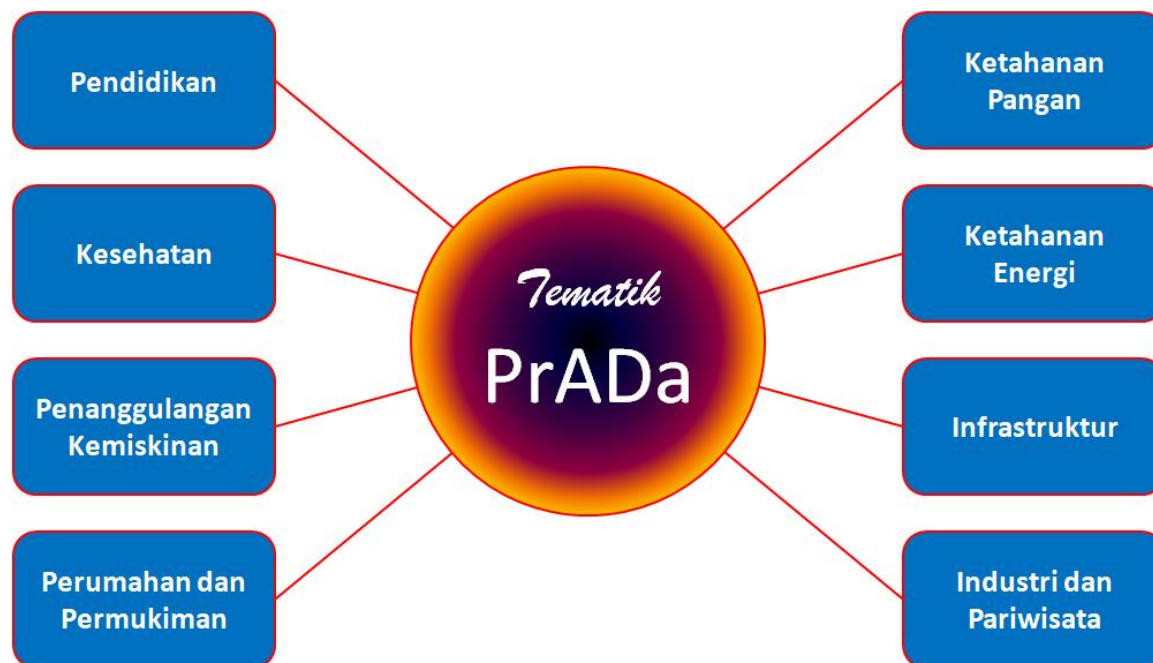
METODOLOGI



2.1. Lingkup Kegiatan

Kegiatan penyusunan PrADa ini akan difokuskan pada tematik pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, perumahan dan permukiman, ketahanan pangan, ketahanan energi, infrastruktur, industri dan pariwisata.

Gambar 2.1
Lingkup Tematik Penyusunan PrADa

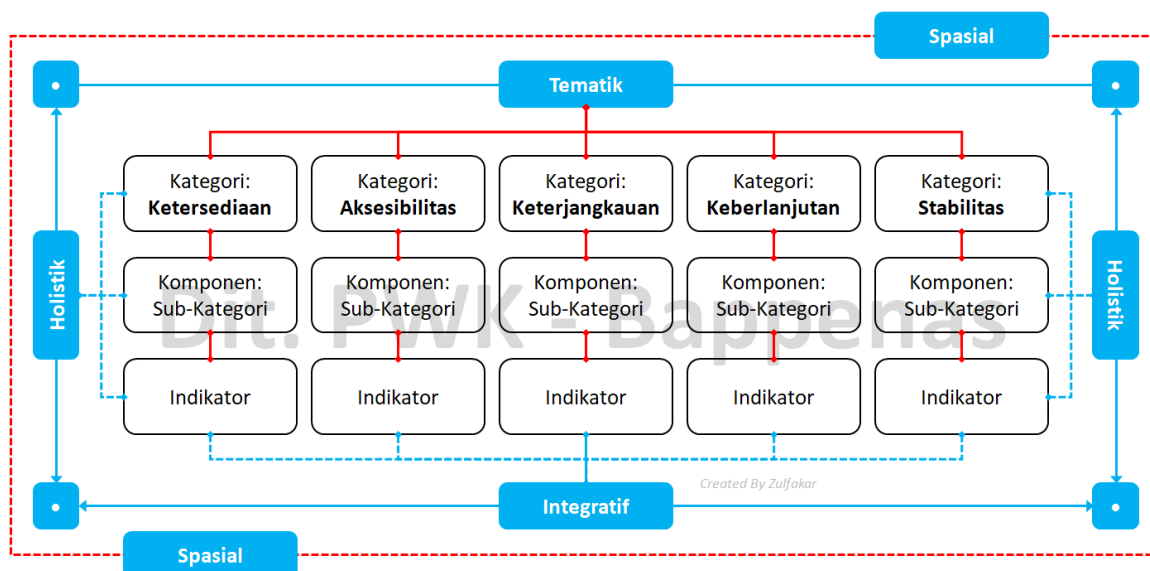


2.2. Metode Analisis

Model analisis yang dipergunakan dalam kegiatan ini melalui metode analisis dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Adapun yang dimaksud dengan "**Tematik**" adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan; "**Holistik**" adalah penjabaran tematik program ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan; "**Integratif**" adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program yang dilihat dari peran kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan; dan "**Spasial**" adalah penjabaran program dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.¹

1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Gambar 2.2
Metode Analisis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)
Penyusunan PrADa



Sumber: Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas.

Lingkup substantif suatu tematik dalam kegiatan ini, dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori yang saling terkait satu sama lainnya (baik secara vertical maupun horizontal), yaitu (1) **ketersediaan**, digunakan untuk menganalisis ketersediaan layanan suatu tematik; (2) **aksesibilitas**, digunakan untuk menganalisis tingkat kemudahan masyarakat dalam mengakses, memperoleh dan/atau menggunakan layanan suatu tematik; (3) **keterjangkauan**, dipergunakan untuk menganalisis keterjangkauan masyarakat dari sisi biaya dalam rangka memperoleh dan/atau menggunakan layanan suatu tematik; (4) **keberlanjutan**, digunakan untuk menganalisis jaminan keberlanjutan terhadap layanan suatu tematik; dan (5) **stabilitas**, digunakan untuk menganalisis tingkat resiko bencana yang dapat menyebabkan terhentinya layanan suatu tematik. Selanjutnya penerapan metode analisis melalui pendekatan THIS ini, sebagaimana yang disajikan dalam Gambar 2.2 tersebut diatas, secara ilustratif diuraikan sebagai berikut:

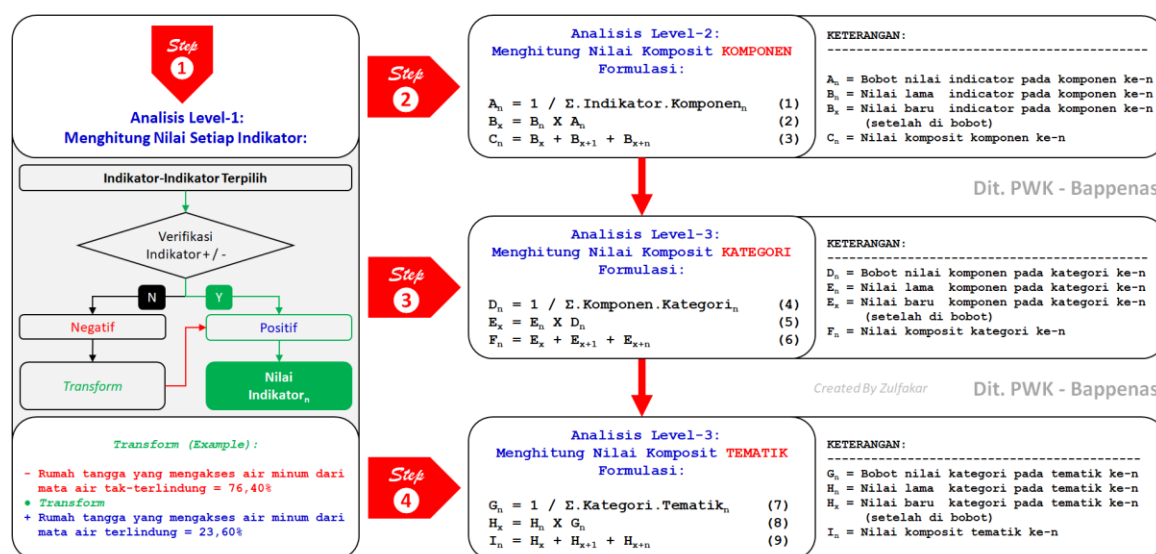
- **Analisis Tematik (Subject)**

Tematik dalam kegiatan ini difokuskan pada tematik pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, perumahan dan permukiman, ketahanan pangan, ketahanan energi, infrastruktur, industri dan pariwisata.

- **Analisis Holistik (*Technocratic Planning*),**

Analisis holistik (*technocratic planning*), merupakan metode analisis hulu-hilir (komprehensif) yang secara **vertical** dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing wilayah, mulai dari level indikator, komponen, kategori sampai dengan tematik. Adapun alur proses dan formulasi dalam melakukan analisis holistik ini disajikan pada Gambar 2.3 sebagai berikut:

Gambar 2.3
Formulasi Analisis Holistik (*Technocratic Planning*)
Penyusunan PrADa



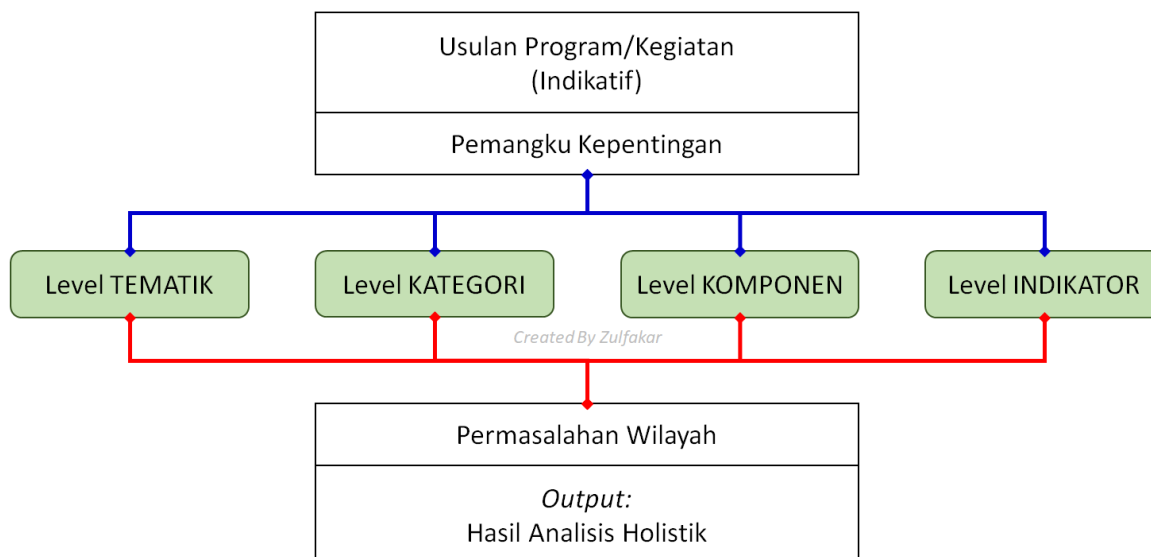
Sumber: Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas.

- **Analisis Integratif (*Coordination/Who's Doing What*)**

Analisis integratif (*coordination/who's doing what*), merupakan metode analisis yang secara **horizontal** digunakan untuk menyusun program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan daerah, disertai dengan pemetaan peran dari para pemangku kepentingan dan pendanaannya (*optional*), mulai dari level indikator komponen, kategori sampai dengan tematik.

Dalam menerapkan analisis integratif ini terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah melakukan analisis holistik. Hasil analisis holistik inilah yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan langkah tindak lanjut dan peran para pemangku kepentingan sesuai tingkat permasalahannya, mulai dari level indikator komponen, kategori sampai dengan tematik. Adapun alur proses dan formulasi dalam melakukan analisis integratif ini disajikan pada gambar 2.4 sebagai berikut:

Gambar 2.4
Analisis Integratif (*Coordination/Who's Doing What*)
Penyusunan PrADa

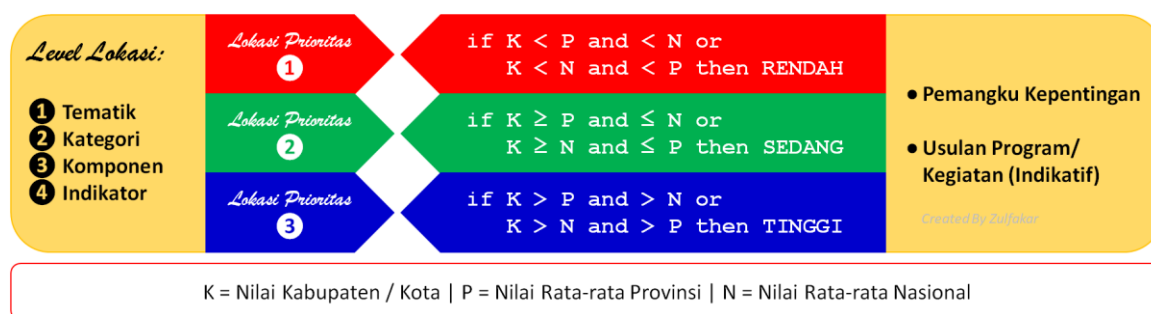


Sumber: Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas.

- **Analisis Spasial (*Spatially Bound*)**

Analisis spasial (*spatially bound*) merupakan metode analisis yang digunakan untuk memetakan lokasi-lokasi yang akan menjadi prioritas, yang akan terbagi ke dalam 3 (tiga) kelas, yaitu daerah dengan tingkat capaian rendah, sedang dan tinggi. Adapun alur proses dan formulasi dalam melakukan analisis spasial ini disajikan pada Gambar 2.5 sebagai berikut:

Gambar 2.5
Analisis Spasial (*Spatially Bound*) Penyusunan PrADa



Sumber: Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas.

Bab-3

PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO REGIONAL

Provinsi Nusa Tenggara Timur²



² Kajian Ekonomi Regional, Bank Indonesia.

3.1. Perkembangan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 tumbuh sebesar 5,16%, sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 5,17% meskipun masih lebih tinggi dibandingkan nasional yang tumbuh 5,07%. Pertumbuhan terutama ditopang oleh konsumsi, terdiri dari konsumsi rumah tangga, lembaga non profit rumah tangga dan pemerintah yang seluruhnya tumbuh meningkat serta pembentukan modal tetap bruto/investasi.

INDIKATOR	2016	2017	2017			%GTQ **)	%YOY **)	
			%YOY)	IV	III			IV
BERDASARKAN SEKTOR/ LAPANGAN USAHA (HARGA BERLAKU)								
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (HARGA BERLAKU)	83,947.8	91,159.7	5.16	22,022.3	23,730.3	24,134.5	0.54	5.29
PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	24,316.9	26,183.6	4.88	6,098.3	6,902.7	6,492.9	-7.12	3.39
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	1,666.8	1,186.1	2.07	309.4	300.6	318.0	5.18	3.37
INDUSTRI PENGOLAHAN	1,034.3	1,147.2	7.36	279.2	296.1	311.4	3.22	7.51
PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	59.4	66.4	0.70	16.0	16.9	18.6	7.62	4.60
PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	49.0	50.5	1.43	12.8	12.9	13.1	0.87	0.95
KONSTRUKSI	8,994.9	9,787.0	6.12	2,437.7	2,565.7	2,676.4	3.09	6.15
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	9,321.8	10,071.6	4.45	2,487.9	2,617.8	2,688.9	1.41	4.06
TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	4,528.3	4,942.9	7.66	1,210.7	1,290.5	1,325.5	2.33	9.04
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	586.1	675.9	13.59	159.8	177.7	192.9	7.23	18.60
INFORMASI DAN KOMUNIKASI	5,878.5	6,194.5	5.10	1,569.3	1,562.5	1,632.5	3.68	3.74
JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	3,357.4	3,726.4	5.81	898.3	945.2	985.8	2.76	4.13
REAL ESTATE	2,209.5	2,347.7	4.96	577.5	602.7	620.0	1.95	4.83
JASA PERUSAHAAN	257.2	279.1	1.43	69.5	72.7	74.3	1.91	0.06
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	10,665.0	11,697.0	2.96	2,827.9	3,065.0	3,282.2	5.14	6.74
JASA PENDIDIKAN	7,983.3	8,917.4	6.24	2,132.0	2,303.0	2,460.6	5.61	7.12
JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	1,768.0	1,941.0	7.36	473.6	494.8	526.7	5.03	8.37
JASA LAINNYA	1,771.4	1,945.4	6.99	462.3	503.5	514.7	1.23	8.53
BERDASARKAN PERMINTAAN / PENGGUNAAN (HARGA BERLAKU)								
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (HARGA BERLAKU)	83,947.8	91,159.7	5.16	22,022.3	23,730.3	24,134.5	0.54	5.29
1. KONSUMSI RUMAH TANGGA	61,506.3	66,707.5	4.72	16,623.8	16,647.7	17,967.9	5.15	3.88
2. KONSUMSI LEMBAGA NON PROFIT (LNPR)	2,636.9	2,920.5	6.86	744.9	747.8	797.0	5.44	2.56
3. KONSUMSI PEMERINTAH	24,346.4	27,194.5	5.24	7,156.4	8,273.1	8,254.1	-2.39	4.81
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	35,725.0	38,685.6	6.05	10,143.2	9,846.2	10,994.9	9.50	7.01
5. PERUBAHAN INVENTORI	458.3	571.0	19.64	166.7	164.5	156.3	-5.68	-9.92
6. EKSPOR LUAR NEGERI	1,776.7	2,282.9	24.67	475.1	627.6	629.1	-4.13	2.71
7. IMPOR LUAR NEGERI	274.8	1,101.7	314.99	51.9	94.6	429.0	352.36	728.56
8. NET EKSPOR ANTAR DAERAH (IMPOR)	-42,227.1	-46,100.6	4.39	-13,235.8	-12,481.9	-14,235.8	8.93	2.28
DATA EKSPOR IMPOR DI PROVINSI NTT								
EKSPOR								
NILAI EKSPOR NONMIGAS (RIBU USD)	45,099	45,099	87.77	25,566	15,335	25,854	68.59	1.13
VOLUME EKSPOR NONMIGAS (TON)	113,307	113,307	36.49	33,475	29,511	369	-98.75	-98.90
IMPOR								
NILAI IMPOR NONMIGAS (RIBU USD)	12,435	12,435	132.36	277	24,321	25,854	6.30	9,222.91
VOLUME IMPOR NONMIGAS (TON)	22,615	22,615	643.50	474	3	369	10,882.92	-22.14

) Total Pertumbuhan 2015 dibandingkan 2014

) Pertumbuhan Q3 2016 dibandingkan Q2 2016

) Pertumbuhan Q3 2016 dibandingkan Q3 2015

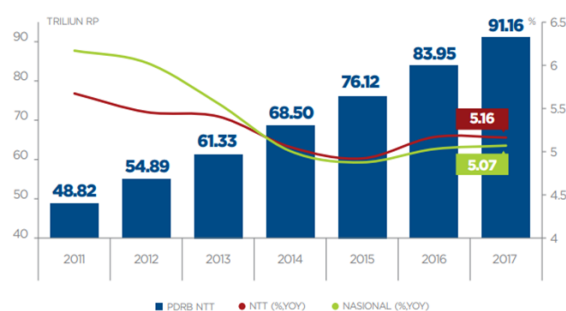
) Untuk mengukur pertumbuhan digunakan PDRB Harga Konstan

Adapun faktor yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi antara lain net impor antar daerah dan impor luar negeri yang tumbuh meningkat, sehingga menjadi pengurang PDRB Provinsi NTT. Net impor antar daerah dan impor luar negeri tumbuh meningkat masing-masing sebesar 4,39% dan 314,99% dibandingkan tahun 2016 sebesar -0,28% dan 5,91%.

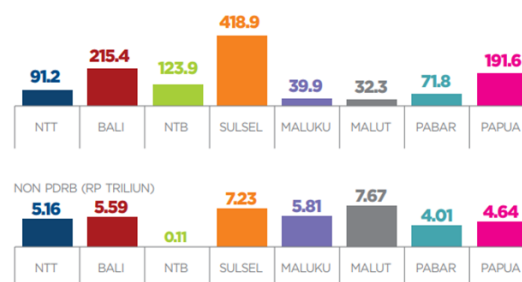
Peningkatan net impor antar daerah dan impor luar negeri terjadi karena meningkatnya investasi dan konsumsi di Provinsi NTT memerlukan peningkatan barang dan jasa yang perlu didatangkan dari daerah lain di dalam negeri dan luar negeri. Selain itu, adanya impor pesawat terbang pada November 2017 oleh salah satu maskapai yang beroperasi di Provinsi NTT turut menjadi penyumbang signifikan impor pada tahun ini. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga sebagai penggerak utama perekonomian Provinsi NTT dengan pangsa lebih dari 70% terhadap total PDRB menunjukkan peningkatan pertumbuhan. Peningkatan didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat, tercermin dari indikator peningkatan nilai tukar petani dan pendapatan saat ini berdasarkan survei konsumen Bank Indonesia. Kondisi tersebut terjadi seiring dengan peningkatan produksi pertanian, upah minimum pegawai tahun 2017 dan bantuan sosial pemerintah, serta didukung oleh capaian inflasi yang lebih rendah dan terkendali.

Berdasarkan sektor utama penyumbang pertumbuhan ekonomi, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2017 mampu tumbuh progresif sebesar 4,88%, lebih baik dibandingkan tahun lalu sebesar 2,37% atau tertinggi dalam tujuh tahun terakhir seiring banyaknya pembukaan lahan pertanian baru tahun ini serta peningkatan jaringan irigasi dan embung yang terus dilakukan. Selain itu, sumber pertumbuhan ekonomi baru yakni sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (pariwisata) mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi di atas 10% dalam dua tahun terakhir yakni 14,46% pada 2016 dan 13,59% pada 2017. Fokus pengembangan sektor ekonomi utama yakni pertanian dan sumber pertumbuhan baru seperti pariwisata dapat terus didorong guna lebih memajukan perekonomian Provinsi NTT.

PDRB (ADHB) dan Pertumbuhan PDRB Tahunan Provinsi NTT dibanding Nasional



PDRB dan Pertumbuhan PDRB Tahunan Beberapa Provinsi di Indonesia



Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tahun 2017 masih cukup rendah apabila dibandingkan dengan beberapa provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dari 18 provinsi yang termasuk dalam KTI, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT berada di peringkat ke-14, kalah dari beberapa provinsi terdekat seperti Maluku (5,81%) dan Bali (5,59%).

Pertumbuhan Provinsi NTT masih lebih baik dibandingkan Papua, Kalimantan Timur dan NTB yang tumbuh masing-masing 4,64%, 3,13% dan 0,11%. Provinsi-provinsi tersebut terkena dampak dari kinerja sektor pertambangan yang belum sepenuhnya pulih di tahun 2017, sehingga tak mampu tumbuh lebih tinggi. Apabila sumber pertumbuhan tersebut dalam kondisi normal, maka kinerja perekonomian provinsi-provinsi tersebut dapat lebih tinggi dibandingkan Provinsi NTT.

1 Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran

Secara tahunan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang mencapai 4,72% menjadi pendorong utama pada tahun 2017. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2017 tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 4,08%. Pertumbuhan disumbang oleh konsumsi makanan dan minuman, pakaian dan alas kaki serta perumahan dan perlengkapan rumah tangga. Kondisi tersebut didukung oleh meningkatnya daya beli masyarakat seiring meningkatnya produksi pertanian, upah minimum pegawai, bantuan sosial oleh pemerintah serta tambahan tunjangan hari raya.

URAIAN	TOTAL		2016		2017		BOBOT	QTG	IV YOY	2017 YOY
	2016	2017	III	IV	III	IV				
PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA	61.506.312	66.707.543	15.388.266	16.623.791	16.647.726	17.967.921	74,45	5,15	3,88	4,72
PENGELUARAN KONSUMSI LNPR	2.636.946	2.920.514	677.222	744.944	747.815	797.011	3,30	5,44	2,56	6,86
PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH	24.346.400	27.194.486	7.580.223	7.156.354	8.273.120	8.254.096	34,20	-2,39	4,81	5,24
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	35.724.984	38.685.565	9.341.925	10.143.179	9.846.171	10.994.853	45,56	9,50	7,01	6,05
PERUBAHAN INVENTORI	458.340	571.030	136.664	166.701	164.497	156.250	0,65	-5,68	-9,92	19,64
EKSPOR LUAR NEGERI	1.776.697	2.282.868	448.575	475.060	627.592	629.140	2,61	-4,13	27,11	24,67
IMPOR LUAR NEGERI	274.813	1.101.703	93.436	51.931	94.647	428.989	1,78	352,36	728,56	314,99
NET EKSPOR ANTAR DAERAH	(42.227.064)	(46.100.564)	(11.676.307)	(13.235.789)	(12.481.932)	(14.235.774)	-58,99	8,93	2,28	4,39
P D R B	83.947.803	91.159.740	21.803.132	22.022.309	23.730.341	24.134.508	100,00	0,54	5,29	5,16

Sumber: BPS Provinsi NTT (diolah)

Akselerasi pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT di triwulan IV 2017 dari sisi pengeluaran terutama dipengaruhi oleh menguatnya konsumsi rumah tangga dan meningkatnya investasi. Pada triwulan IV 2017 konsumsi rumah tangga tumbuh meningkat sebesar 3,88% dibandingkan triwulan III 2017 sebesar 2,71%, meskipun masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 5,02%.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/investasi juga mengalami akselerasi pertumbuhan sebesar 7,01%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 3,99% dan 4,42%.

Realisasi investasi yang tinggi di bidang tanaman pangan dan perkebunan terutama oleh swasta menjadi faktor pendorong utama akselerasi pertumbuhan investasi di triwulan IV 2017. Di sisi lain, menguatnya konsumsi rumah tangga tidak diikuti oleh konsumsi pemerintah yang sedikit melambat seiring realisasi anggaran pemerintah yang telah lebih banyak dilakukan pada triwulan III 2017.

Ekspor luar negeri tercatat tumbuh melambat sebesar 27,11% dibandingkan triwulan III 2017 yang tumbuh 36,87% seiring melambatnya permintaan dari Timor Leste pasca pemenuhan yang telah banyak dilakukan pada triwulan III 2017 dalam rangka persiapan Natal dan Tahun Baru. Kondisi berbeda terjadi pada impor luar negeri yang tumbuh tinggi sebesar 728,56% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,82% yang didorong oleh adanya impor pesawat terbang dari Perancis senilai US\$ 12,50 juta pada bulan November 2017.

2 Perkembangan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi NTT pada tahun 2017 terutama didorong oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, transportasi dan pergudangan serta jasa pendidikan. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tercatat tumbuh sebesar 4,88%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,37%. Sektor transportasi dan pergudangan serta jasa pendidikan juga tumbuh meningkat sebesar 7,66% dan 6,24%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,43% dan 4,18%. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mampu tumbuh lebih tinggi seiring meningkatnya produksi pertanian pada tahun ini dengan adanya peningkatan luas lahan pertanian, jaringan irigasi, bantuan bibit dan pelatihan kepada petani yang lebih intensif. Sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan peningkatan pertumbuhan terutama didorong oleh adanya penambahan jadwal dan rute pesawat terbang di Provinsi NTT seperti Jakarta-Labuan Bajo oleh Batik Air, Kupang-Makassar oleh Garuda Indonesia, Kupang-Dili oleh Air Timor dan Kupang-Bali oleh NAM Air.

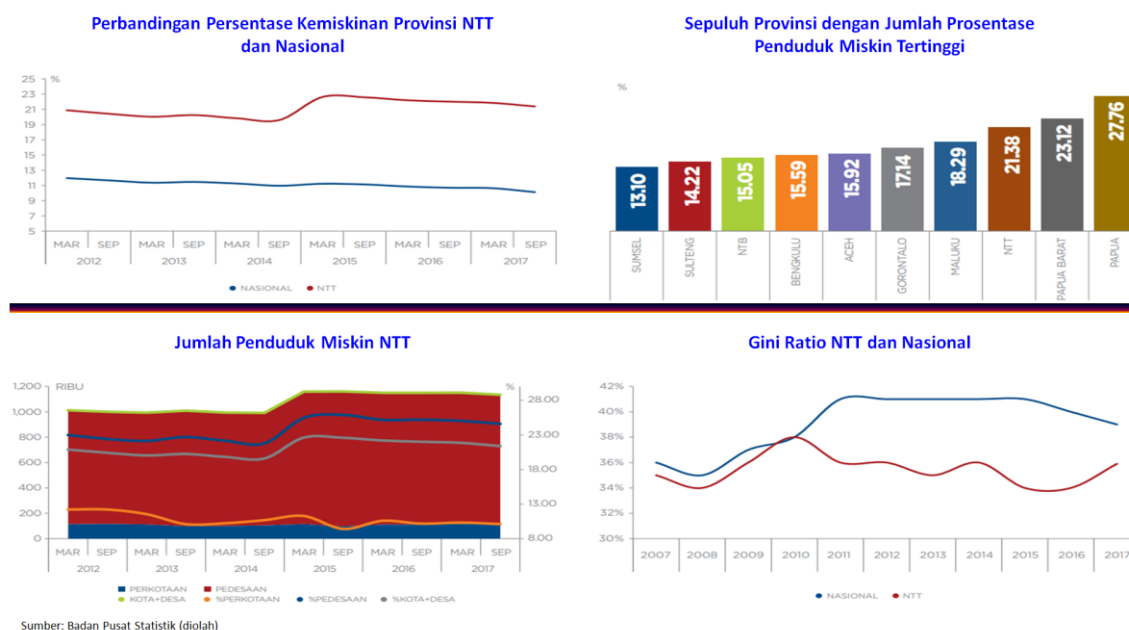
URAIAN	TOTAL		2016		2017		BOBOT	GTQ	IV YOY	2017 YOY
	2016	2017	III	IV	III	IV				
PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	24.316.946	26.183.603	6.423.171	6.098.254	6.902.730	6.492.915	26,90	-712	3,39	4,88
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	1.166.764	1.186.099	301.698	309.436	300.584	318.019	1,32	5,18	3,37	2,07
INDUSTRI PENGOLAHAN	1.034.289	1.147.211	265.244	279.169	296.079	311.419	1,29	3,22	7,51	7,36
PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	59.409	66.389	15.331	15.975	16.861	18.600	0,08	7,62	4,60	0,70
PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	48.990	50.483	12.691	12.841	12.947	13.120	0,05	0,87	0,95	1,43
KONSTRUKSI	8.994.924	9.787.049	2.362.865	2.437.734	2.565.727	2.676.426	11,09	3,09	6,15	6,12
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA, MOTOR	9.321.848	10.071.551	2.456.270	2.487.909	2.617.777	2.688.903	11,14	1,41	4,06	4,45
TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	4.528.290	4.942.877	1.186.069	1.210.726	1.290.516	1.325.457	5,49	2,33	9,04	7,66
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	586.079	675.949	154.603	159.845	177.691	192.862	0,80	7,23	18,60	13,59
INFORMASI DAN KOMUNIKASI	5.878.513	6.194.545	1.511.013	1.569.272	1.562.478	1.632.475	6,76	3,68	3,74	5,10
JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	3.357.415	3.726.412	837.549	898.325	945.158	985.841	4,08	2,76	4,13	5,81
REAL ESTATE	2.209.476	2.347.679	567.351	577.531	602.721	619.978	2,57	1,95	4,83	4,96
JASA PERUSAHAAN	257.185	279.075	66.388	69.530	72.739	74.299	0,31	1,91	0,06	1,43
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	10.664.989	11.697.016	2.731.064	2.827.864	3.064.968	3.282.171	13,60	5,14	6,74	2,96
JASA PENDIDIKAN	7983.265	8.917.405	2.017.982	2.131.982	2.303.011	2.460.569	10,20	5,61	7,12	6,24
JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	1.767.997	1.941.037	443.925	473.595	494.812	526.729	2,18	5,03	8,37	7,36
JASA LAINNYA	1.771.425	1.945.361	449.919	462.317	503.544	514.728	2,13	1,23	8,53	6,99
PDRB	83.947.803	91.159.740	21.803.132	22.022.309	23.730.341	24.134.508	100,00	0,54	5,29	5,16

Sumber: BPS Provinsi NTT (datah) *Dalam Juta Rp

Di sisi lain, pertumbuhan jasa pendidikan meningkat seiring investasi di bidang pendidikan oleh pemerintah yang banyak dilakukan pada tahun 2016 seperti penambahan jumlah ruang kelas di sekolah menengah atas, sekolah kejuruan dan universitas/politeknik serta pembangunan pusat kursus telah selesai dikerjakan pada Desember 2016 dan mulai dipergunakan pada tahun 2017. Selain itu, ditambah pula dengan adanya penambahan jumlah ruang kelas dan laboratorium di universitas/politeknik pada tahun 2017. Peningkatan pertumbuhan sektor-sektor utama Provinsi NTT menjadi faktor penyebab meningkatnya pertumbuhan ekonomi di triwulan IV 2017. Sektor-sektor utama yang mengalami akselerasi adalah administrasi pemerintahan dan jasa pendidikan. Selain itu, sektor-sektor lain seperti transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta real estate juga menunjukkan peningkatan.

3.2. Tingkat Kemiskinan

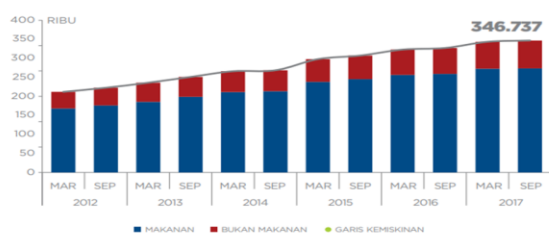
Persentase penduduk miskin NTT pada bulan September 2017 mencapai 21,38 persen atau berada di atas nasional yang sebesar 10,12 persen. Persentase penduduk miskin Provinsi NTT berada pada peringkat tiga tertinggi di Indonesia, di bawah Provinsi Papua (27,76 persen) dan Provinsi Papua Barat (23,12 persen).



Dari sisi ketimpangan pengeluaran, gini ratio di NTT pada tahun 2017 tercatat sebesar 0,36 atau cenderung berada pada level ketimpangan menengah. Angka ini lebih baik dibandingkan dengan nasional yang sebesar 0,39. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran masyarakat di NTT cenderung lebih merata apabila dibandingkan dengan nasional.

Dari sisi garis kemiskinan, terdapat peningkatan pada bulan September 2017 sebesar 0,97 persen menjadi Rp 346.737 per kapita per bulan, dibandingkan Maret 2017 yang sebesar Rp 343.396 per kapita per bulan. Peningkatan garis kemiskinan yang diiringi oleh penurunan jumlah penduduk miskin mengindikasikan adanya perbaikan daya beli masyarakat di NTT Pada September 2017. Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap GK sebesar 78,83 persen, sedikit menurun dibanding periode Maret 2017 yang sebesar 79,37 persen. Hal ini menunjukkan inflasi pedesaan yang juga relatif rendah.

Perkembangan Garis Kemiskinan



Sepuluh Provinsi dengan Garis Kemiskinan Terendah

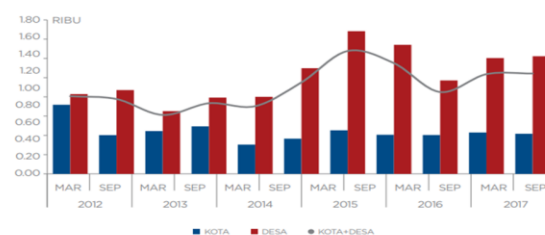


Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)



Secara nasional, GK Provinsi NTT berada di peringkat ke-28 setelah Provinsi NTB. Provinsi dengan garis kemiskinan tertinggi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp 607.927. Sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki GK terendah sebesar Rp 294.358 yang mengindikasikan rendahnya tingkat harga di Provinsi tersebut.

Pada sisi indikator indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) tercatat adanya kenaikan. Pada September 2017, P1 tercatat sebesar 4,16 atau turun dibandingkan Maret 2017 yang sebesar 4,34. Sementara itu, angka P2 relatif stagnan pada kisaran angka 1,17. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi GK dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin tetap.

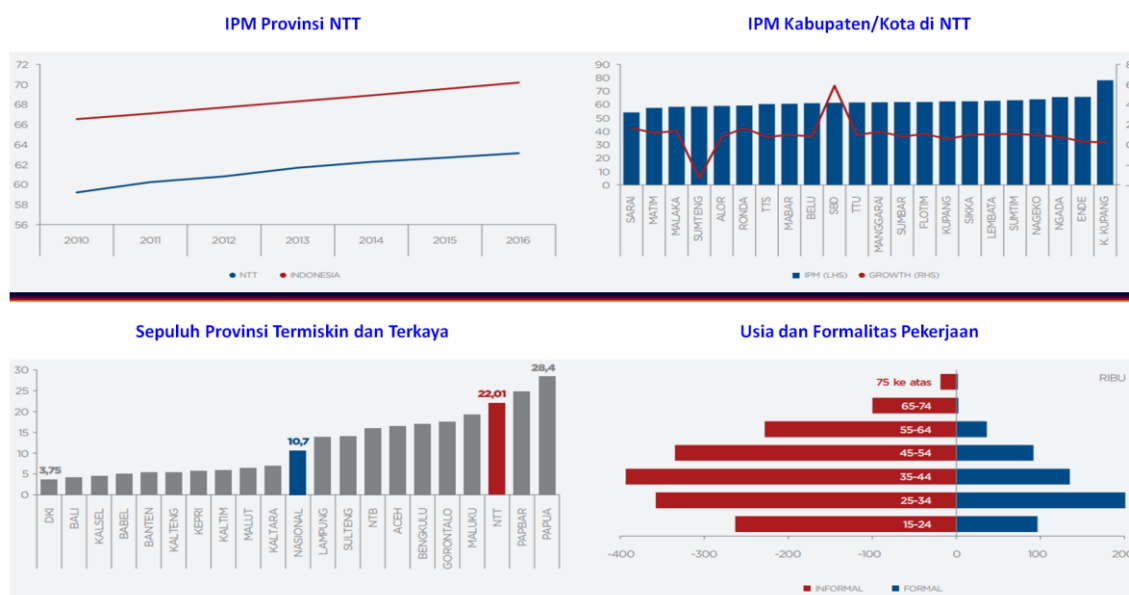
Kondisi kemiskinan di Provinsi NTT secara umum menunjukkan trend menurun. Namun demikian persentase kemiskinan yang masih berada di atas 20 persen, sehingga permasalahan kemiskinan masih perlu mendapat perhatian. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya melalui program sosial, seperti Desa Mandiri Anggur Merah (DeMAM), Program Keluarga Harapan (PKH), Rastra dan program lainnya.

Namun demikian, pelaksanaan program tersebut masih kurang efektif dikarenakan oleh lemahnya sinergi antar level pemerintah. Adanya investasi yang masuk di NTT seperti, pembangunan berbagai proyek strategis nasional, pembangunan industri gula di Sumba, perkembangan sektor ritel di Kota Kupang serta pariwisata di Labuan Bajo diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja yang ada.

Selain itu, program Dana Desa yang telah dikururkan mulai tahun 2015, juga diharapkan mampu mendorong ekonomi masyarakat di lingkup pedesaan. Peningkatan kualitas SDM menjadi hal terpenting untuk mendukung hal tersebut melalui pendidikan formal dan pelatihan keterampilan.

3.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT menempati urutan terendah ketiga secara nasional setelah Papua dan Papua Barat. Pertumbuhan IPM NTT juga hanya sebesar 0,73% lebih rendah dibanding nasional yang sebesar 0,91%. Pertumbuhan IPM yang tinggi hanya terjadi pada Kabupaten Sumba Barat Daya yang tumbuh 5,87%, namun juga terjadi penurunan IPM yang cukup besar di Kabupaten Sumba Tengah hingga 3,32%.

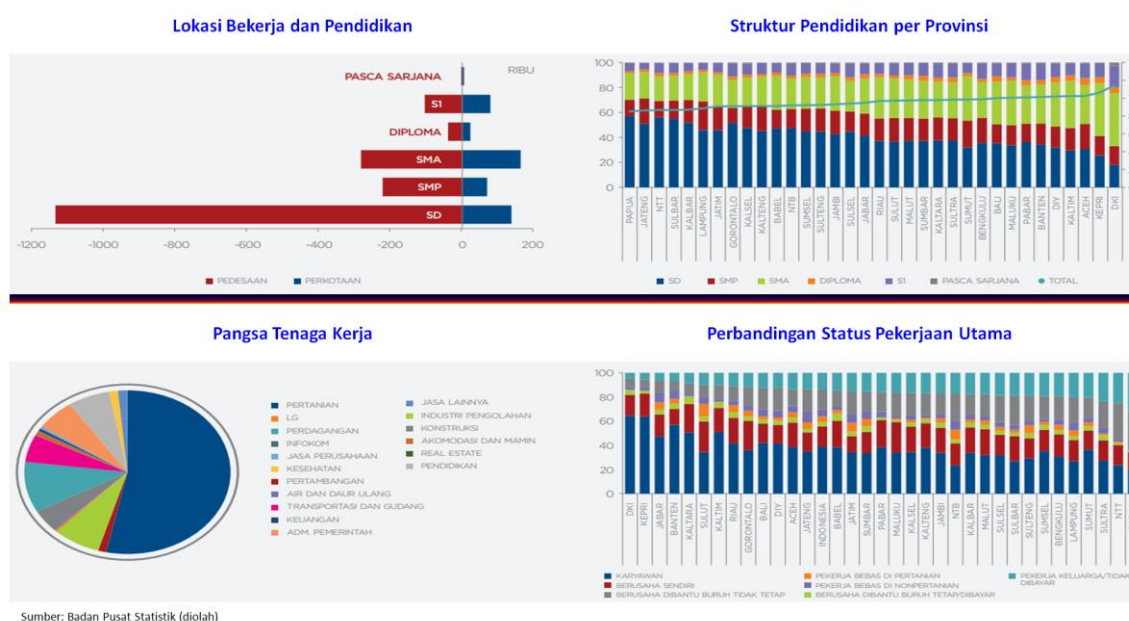


Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

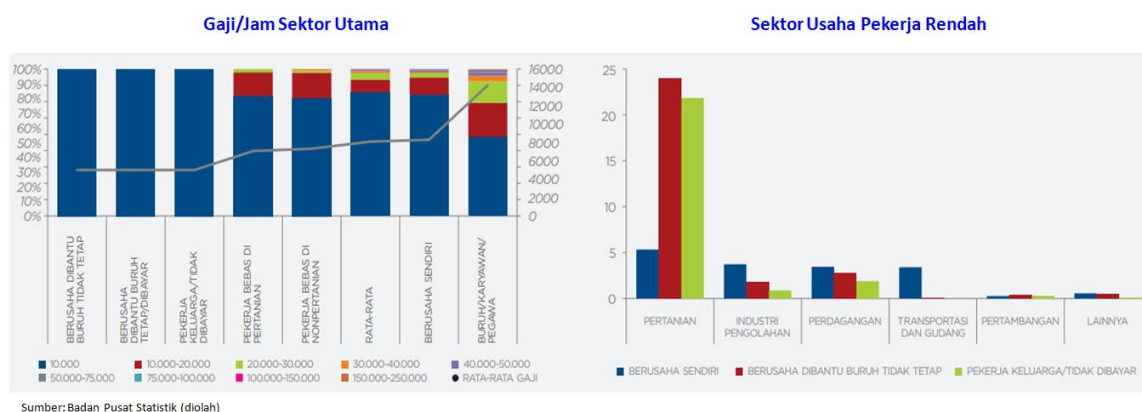
Rendahnya IPM terutama disebabkan oleh indikator pengeluaran perkapita yang hanya sebesar 7,12 juta, dan menjadi pengeluaran perkapita terendah di Indonesia. Peringkat rata-rata pendidikan di NTT terendah keempat di Indonesia, dan harapan hidup juga terendah keenam dibanding provinsi lainnya. Angka kemiskinan menunjukkan sebagai Provinsi termiskin ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin mencapai 22,01% dari populasi, jauh lebih besar dari nasional yang sebesar 10,7%.

Apabila dilihat dari struktur pekerjaan di NTT, terlihat bahwa semua kelompok usia didominasi oleh pekerjaan informal. 79% pekerja berada di pedesaan dan lebih dari 50% berpendidikan SD dan terkonsentrasi di pedesaan.

NTT juga memiliki rata-rata pekerja dengan pendidikan terendah ketiga setelah Provinsi Papua dan Jawa Tengah. 56,2% pekerja memiliki latar belakang pendidikan hanyalah sekolah dasar, sedikit lebih baik dari Papua yang sebesar 57,2%. Berdasarkan sektor ekonomi, 53,3% pekerja bekerja di sektor pertanian. Hal ini menjadikan provinsi NTT sebagai provinsi dengan rasio pekerja petani terbesar kedua setelah Provinsi Papua. Sektor ekonomi dengan pekerja terbesar selanjutnya adalah sektor perdagangan (10,0%), industri pengolahan (7,4%), jasa pendidikan (6,6%) dan administrasi pemerintah (6,2%).



Berdasarkan status pekerjaan utama juga terlihat bahwa pekerja terbanyak di NTT adalah pekerja keluarga tidak dibayar dan berusaha dibantu buruh tidak tetap yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan industri pengolahan. Hal ini menunjukkan rendahnya kualitas pekerja pertanian ataupun karakter industri pengolahan NTT yang masih bersifat industri rumahan, berbeda dengan industri di Jawa yang mulai beralih ke industri menengah dan besar. Rata-rata gaji yang didapat per jam juga menunjukkan bahwa 84,1% pekerja di NTT hanya mendapat gaji kurang dari 10 ribu per jam atau 85,5% penduduk mendapat gaji kurang dari 1,5 juta per bulan, lebih rendah dari UMP NTT 2017 yang sebesar Rp 1.525.000.



Sebanyak 393 ribu atau 20,75% pekerja merupakan pekerja keluarga tidak dibayar dan 30,42% atau 576 ribu pekerja merupakan buruh tidak tetap. Pekerja dengan penghasilan rendah tersebut terkonsentrasi pada sektor pertanian, selain juga pada sektor industri pengolahan dan perdagangan. Adapun pekerja dengan pendapatan terbesar adalah pekerja formal dengan status karyawan.

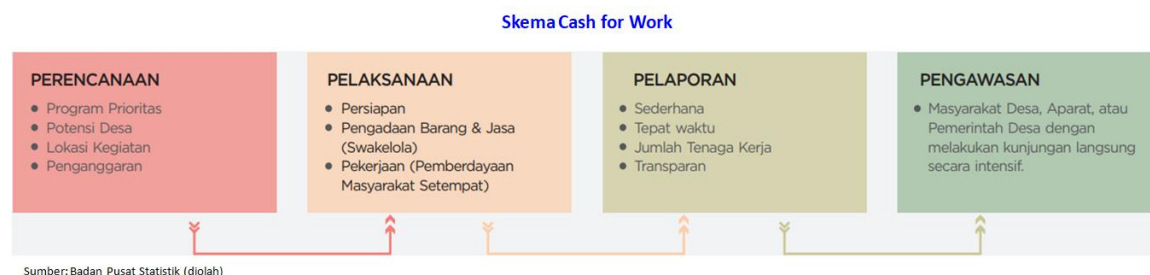
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa walaupun angka pengangguran terbuka di NTT relatif rendah, namun permasalahan utama ketenagakerjaan di NTT adalah pada kualitas pekerjaan yang rendah, meliputi terlalu banyaknya pekerjaan sektor informal dan pekerjaan utama berupa pekerja keluarga tidak dibayar ataupun buruh tidak tetap dengan sebagian besar pekerja memperoleh gaji yang rendah atau bahkan tidak memperoleh penghasilan. Oleh karena itu, diharapkan, pemerintah ke depan dapat lebih fokus pada peningkatan kapasitas tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja formal. Hal ini bisa dilakukan baik dengan penciptaan proyek padat karya sebagaimana yang dilakukan dana desa, ataupun mempermudah ijin investasi agar industrialisasi dapat berkembang di NTT. Ketidakefisienan proses produksi pertanian dapat dilakukan dengan menggeser pekerja pertanian ke sektor formal lainnya dan menerapkan sistem mekanisasi untuk menekan biaya produksi, mempercepat dan meningkatkan produksi.

3.4. Perkembangan Dana Desa

Sejak dana desa dikururkan perdana pada tahun 2015, dana desa secara nasional telah ikut berkontribusi dalam berbagai proyek pembangunan desa. Realisasi dana desa hingga tahap I tahun 2017, pemerintah telah berhasil membangun 121.709 km jalan desa, 1.960 km jembatan, 41.739 saluran irigasi, 13.973 unit Posyandu, 21.357 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 82.356 unit MCK, dan lain sebagainya.

Dalam perjalanannya, dana desa mengalami berbagai penyempurnaan. Pada akhir tahun 2017, Pemerintah menetapkan skema baru untuk pengelolaan dana desa periode tahun anggaran 2018 yakni dengan menggunakan skema *Cash for Work* atau Padat Karya Tunai. Skema ini diarahkan agar dana desa dikelola secara swakelola dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai proyek desa, baik untuk pengadaan barang dan jasa maupun untuk tenaga kerjanya.

Jika pada skema sebelumnya nilai proyek yang mencapai 200 juta atau lebih harus menggunakan kontraktor, maka pada skema *cash for work* ini pemerintah telah melarang menggunakan jasa pihak ketiga sejauh proyek tersebut tidak memerlukan alat berat.



Target dari skema ini adalah para Penganggur, Setengah Menganggur, Masyarakat Miskin, dan Peserta Program Keluarga Harapan. Skema baru ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat desa, khususnya yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Pemerintah mengubah tahapan pencairan dana desa yang pada periode sebelumnya dicairkan dua kali dalam satu tahun menjadi tiga kali dalam satu tahun serta mempercepat waktu pencairan anggaran guna mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan penyerapan anggaran. Jika pada periode sebelumnya pencairan anggaran baru bisa dilakukan pada bulan Maret, maka anggaran dana desa TA 2018 pada minggu kedua bulan Januari sudah bisa dicairkan.

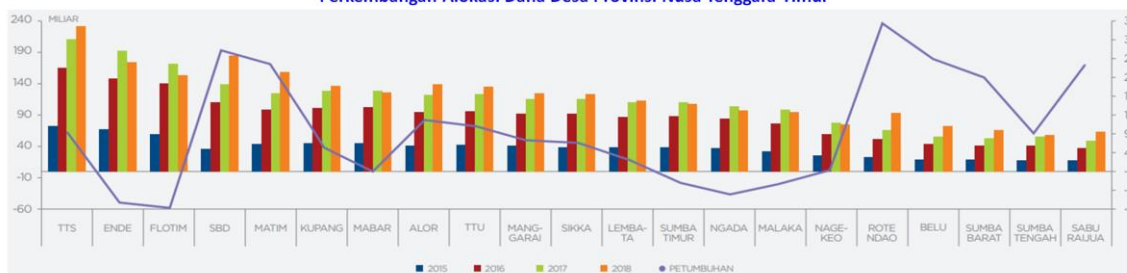
Dana desa terus mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Dalam hal ini, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada periode tahun pertama program dana desa dilaksanakan, Provinsi NTT mendapat kucuran dana sebesar 812,8 milyar rupiah, kemudian meningkat di periode tahun kedua sebesar 1,8 triliun rupiah, meningkat kembali sebesar 2,3 triliun rupiah pada periode tahun ketiga, dan meningkat kembali pada periode keempat menjadi sebesar 2,5 triliun rupiah untuk 21 Kabupaten/Kota dan 2.996 desa di seluruh Provinsi NTT.

Alokasi anggaran dana desa terbesar pada tahun 2015 sebesar 73,6 milyar rupiah diperoleh Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Kemudian meningkat sebesar 165,1 milyar rupiah pada tahun 2016, meningkat kembali pada tahun 2017 menjadi sebesar 210,7 milyar rupiah, dan terakhir per Tahun Anggaran 2018 alokasi dana desa bagi kabupaten TTS meningkat kembali menjadi sebesar 233,6 milyar rupiah untuk 266 desa. Sedangkan alokasi dana terkecil diberikan kepada Kabupaten Sabu Raijua, karena kabupaten tersebut hanya memiliki 57 desa per tahun 2018.

Perbandingan Tahapan Pencairan Tahun 2017 dan 2018

TAHAPAN PENCAIRAN DANA DESA PERIODE TA 2017	TAHAPAN PENCAIRAN DANA DESA PERIODE TA 2018
1. TAHAP I PALING CEPAT BULAN MARET SEBESAR 60%, DENGAN SYARAT:	1. TAHAP I PALING CEPAT JANUARI SEBESAR 20%, DENGAN SYARAT:
PERATURAN DAERAH MENGENAI APBD TA BERJALAN	PERATURAN DAERAH MENGENAI APBD
PERATURAN BUPATI/WALIKOTA MENGENAI TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA SETIAP DESA	PERATURAN KEPALA DAERAH MENGENAI TATA CARA PENGALOKASIAN DAN RINCIAN DANA DESA PER DESA
LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA DESA TA SEBELUMNYA.	
LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA TA SEBELUMNYA.	2. TAHAP II PALING CEPAT MARET SEBESAR 40%, DENGAN SYARAT:
	LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA DESA TA SEBELUMNYA.
2. TAHAP II PALING CEPAT BULAN AGUSTUS SEBESAR 40%, DENGAN SYARAT:	LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN PENCAPAIAN OUTPUT DANA DESA TA SEBELUMNYA.
LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA DESA TAHAP I	1. TAHAP III PALING CEPAT JULI SEBESAR 40%, DENGAN SYARAT:
LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA TAHAP I	- LAPORAN REALISASI DANA DESA SAMPAI DENGAN TAHAP II.
	- LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DANA DESA SAMPAI DENGAN TAHAP II.

Perkembangan Alokasi Dana Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur



Sumber: Kementerian Keuangan dan Berbagai Sumber (diolah)

Pada tahun 2018 Kabupaten Sabu Raijua mendapatkan alokasi dana desa sebesar 63,4 milyar rupiah meningkat 14,1 milyar rupiah dari periode sebelumnya. Peningkatan jumlah alokasi dana desa setiap tahun merupakan wujud komitmen pemerintah untuk membangun infrastruktur desa seperti jalan desa, irigasi, sanitasi, embung, dan proyek infrastruktur desa lainnya. Besar kecilnya alokasi dana desa setiap kabupaten di setiap tahunnya disebabkan oleh beberapa hal, seperti jumlah desa di setiap kabupaten, tingkat penyerapan anggaran, dan alokasi formula setiap desa yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa.

Salah satu yang paling mempengaruhi perubahan jumlah alokasi dana desa pada setiap tahunnya adalah tingkat penyerapan anggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 7 menegaskan bahwa seandainya terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada tahun anggaran berjalan, Bupati/Walikota memberikan sanksi berupa pemotongan anggaran pada tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan.

Dalam peraturan skema yang baru, sebesar 30% dari total dana desa digunakan untuk membayar upah bagi para pekerja yang terlibat dalam program pembangunan di setiap desa. Artinya, dari 2,5 triliun rupiah dana desa yang diperoleh provinsi NTT pada tahun 2018, sebesar 760 milyar rupiah akan dialokasikan sebagai upah. Jika pada tahun 2017 alokasi untuk upah hanya sebesar 20% dari total dana desa sebesar 2,3 triliun rupiah yakni 472 miliar rupiah, maka pada TA 2018 seiring dengan meningkatnya alokasi dana desa, upah pekerja atau belanja tenaga kerja pun bertambah sebesar 288,7 miliar rupiah.

Peningkatan dana yang mengalir sebagai pendapatan masyarakat tersebut berpotensi meningkatkan PDRB Provinsi NTT hingga 0.29% dari proyeksi PDRB tahun 2018 yang di kisaran 100 triliun rupiah.

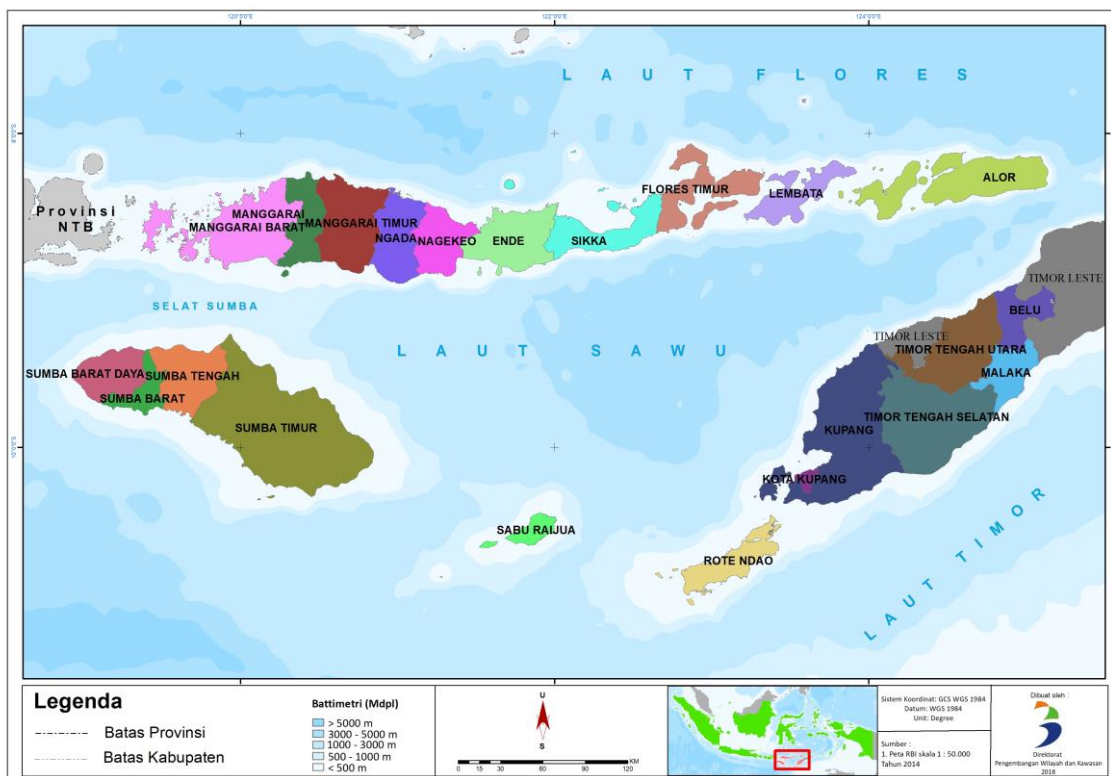
Dari sisi penyerapan tenaga kerja, jika setiap desa memiliki 4 program pembangunan prioritas, maka akan terdapat 11.984 lapangan kerja. Dengan asumsi tenaga kerja per proyek dibutuhkan 20 orang dengan 25% pegawai selalu ikut dalam proyek tersebut, maka potensi tenaga kerja yang akan terserap dari seluruh program dana desa yang diselenggarakan adalah sebanyak 194.740 orang.

Peningkatan upah pekerja ini secara sederhana mungkin bisa ditanggapi berbeda, yaitu adanya potensi penurunan aset karena adanya peralihan dari pembelian bahan baku ke biaya upah. Namun demikian, dampak positif yang dapat dirasakan adalah adanya skema padat karya ini selain dapat meningkatkan daya beli masyarakat, juga dapat meningkatkan rasa memiliki masyarakat atas proyek yang dilakukan, sehingga diharapkan, karena proyek tersebut dari, untuk dan oleh masyarakat, maka keinginan masyarakat untuk membuat proyek yang bagus semakin besar, sehingga potensi korupsi dan penurunan kualitas juga akan berkurang karena masyarakat menyadari bahwa proyek tersebut untuk mereka sendiri. Dengan demikian, potensi pengurangan aset justru tidak terjadi karena turunnya potensi fraud yang terjadi.

Bab-4

PrADa

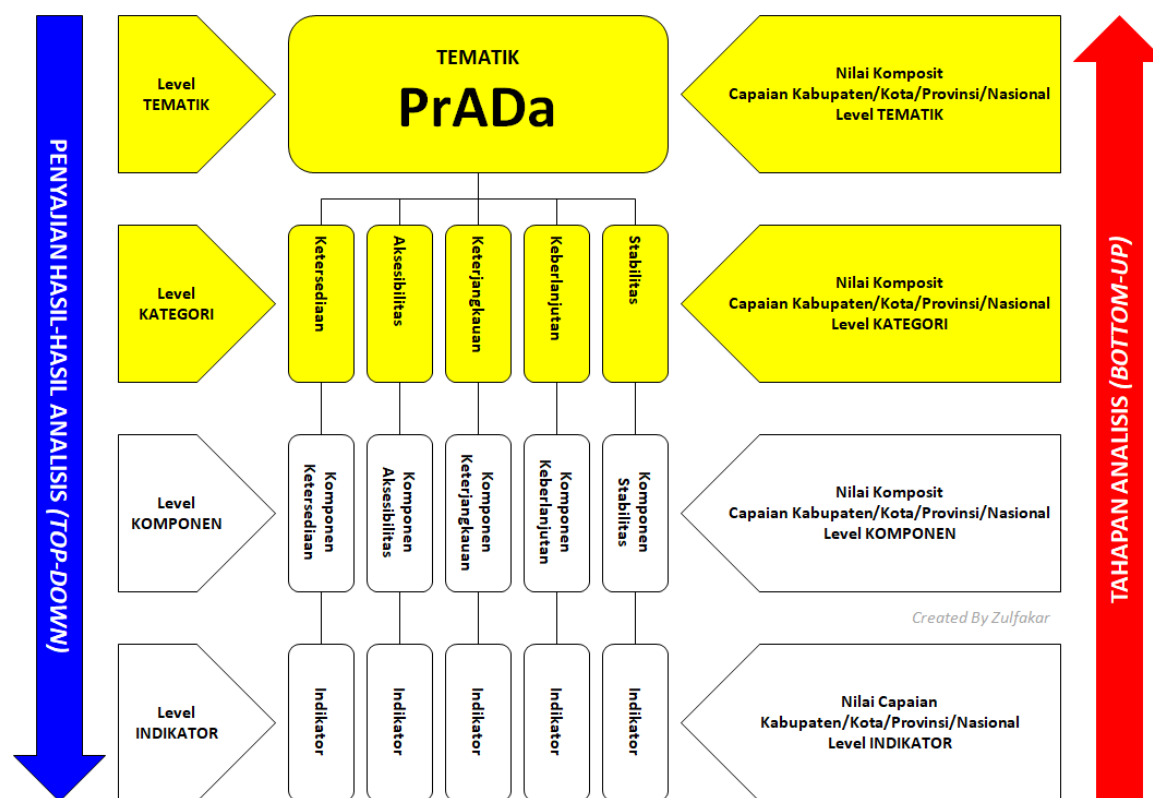
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Model analisis yang dipergunakan dalam penyusunan PrADa ini dilakukan melalui pendekatan metode analisis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Tematiknya adalah pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, perumahan dan permukiman, ketahanan pangan, infrastruktur, ketahanan energi, industri dan pariwisata.

Holistik (*technoratic planning*) terbagi ke dalam 4 level analisis yang saling terkait satu dengan yang lainnya, dimulai dari level indikator, komponen, kategori, dan tematik (*bottom-up*). Integratif (*coordination/who's doing what*) untuk memetakan peran para pemangku kepentingan (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Swasta) termasuk merumuskan program/kegiatan (indikatif), mulai dari level indikator, komponen, kategori, dan tematik. Spasial (*spatially bound*) untuk memetakan wilayah-wilayah dengan tingkat capaian terhadap indikator, komponen, kategori dan tematik rendah, sedang atau tinggi.

Gambar 4.1
Struktur dan Lingkup Penyajian Hasil Analisis
Penyusunan PrADa



Mengacu kepada Gambar 4.1 tersebut di atas, terlihat bahwa kalau dalam proses analisis menggunakan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*), yang dimulai dari level indikator, komponen, kategori sampai dengan tematik, maka dalam penyajian hasil analisis justru sebaliknya, yaitu menggunakan pendekatan dari atas ke bawah (*top-down*), dimulai dari level tematik sampai dengan level kategori.

Analisis level tematik, bertujuan untuk memetakan kabupaten/kota di wilayah provinsi Sumatera Barat yang memiliki nilai komposit suatu tematik dengan tingkat capaian RENDAH, SEDANG dan TINGGI. Nilai komposit suatu tematik berasal dari 5 (lima) unsur kategori pembentuknya yaitu (1) ketersediaan, (2) aksesibilitas, (3) keterjangkauan, (4) keberlanjutan, dan (5) stabilitas.

Sementara itu, analisis level kategori, bertujuan untuk memetakan kabupaten/kota di wilayah provinsi Sumatera Barat yang memiliki nilai komposit kategori dengan tingkat capaian RENDAH, SEDANG dan TINGGI. Nilai komposit setiap kategori berasal dari masing-masing unsur komponen pembentuknya.

Adapun, dalam menentukan kabupaten/kota memiliki nilai komposit dengan tingkat capaian suatu tematik/kategori RENDAH, SEDANG dan TINGGI, ditentukan dengan 3 (tiga) kriteria sebagai berikut:

- **Tingkat Capaian Tematik/Kategori Kabupaten/Kota RENDAH**

Jika, nilai komposit kabupaten/kota lebih kecil dari nilai provinsi DAN nilai nasional, ATAU nilai kabupaten/kota lebih kecil dari nilai nasional DAN lebih kecil dari nilai provinsi.

- **Tingkat Capaian Tematik/Kategori Kabupaten/Kota SEDANG**

Jika, nilai komposit kabupaten/kota lebih besar atau sama dengan nilai provinsi DAN lebih kecil atau sama dengan nilai nasional, ATAU nilai kabupaten/kota lebih besar atau sama dengan nilai nasional DAN lebih kecil atau sama dengan nilai provinsi.

- **Tingkat Capaian Tematik/Kategori Kabupaten/Kota TINGGI**

Jika, nilai komposit kabupaten/kota lebih besar dari nilai provinsi DAN nilai nasional, ATAU nilai kabupaten/kota lebih besar dari nilai nasional DAN lebih besar dari nilai provinsi.

4.1

Tematik:

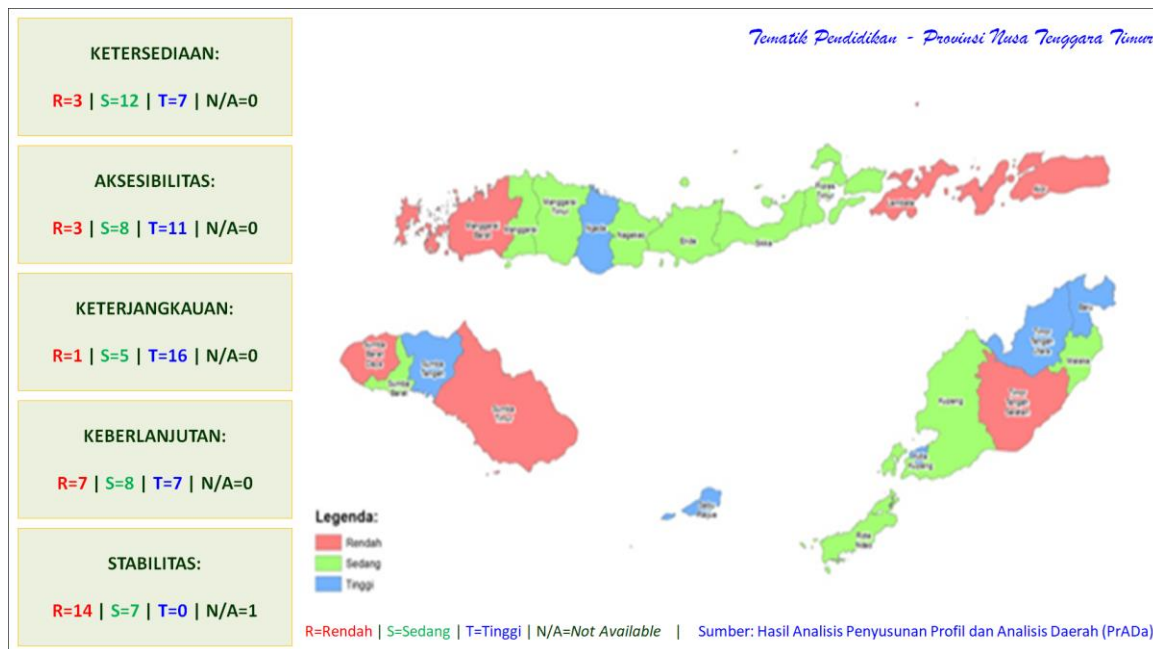
Pendidikan

Provinsi Nusa Tenggara Timur



Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
Kategori	Komponen	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Murid • Guru • Sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio siswa/rombel SD; • Rasio siswa/rombel SMP; • Rasio siswa/rombel SMA; • Rasio rombel/ruang kelas SD; • Rasio rombel /ruang kelas SMP; • Rasio rombel /ruang kelas SMA; • Rasio siswa/guru SD; • Rasio siswa/guru SMP; • Rasio siswa/guru SMA. • Presentase guru SD kualifikasi; • Presentase guru SMP kualifikasi; • Presentase guru SMA kualifikasi. • Presentase kerusakan ruang kelas SD; • Presentase kerusakan ruang kelas SMP; • Presentase kerusakan ruang kelas SMA.
<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Jarak layanan • Infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata jarak SD/SMP/SMA; • Desa beraspal.
<ul style="list-style-type: none"> • Keterjangkauan 	<ul style="list-style-type: none"> • Blaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata pengeluaran keluarga untuk pendidikan per bulan.
<ul style="list-style-type: none"> • Keberlanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Partisipasi Murid SD/SMP/SMA;
<ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Resiko bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) kabupaten/kota.

Hasil Analisis Tematik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur

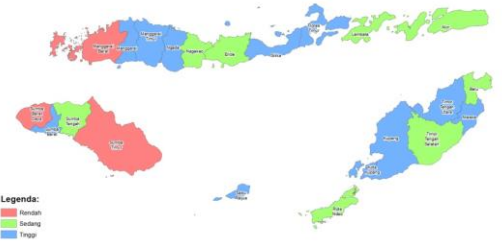


No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Pendidikan
01.	Sumba Timur	Rendah	Prioritas 1	<p style="text-align: center;">RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK</p> <p style="text-align: center;">PENDIDIKAN</p> <p style="text-align: center;">KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI</p> <p style="text-align: center;">NUSA TENGGARA TIMUR</p> <p style="text-align: center;">DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI</p> <p style="text-align: center;">KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS, RELATIF</p> <p style="text-align: center;">SEDANG</p> <p style="text-align: center;">RENDAH : 6 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">SEDANG : 10 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">TINGGI : 6 KABUPATEN/KOTA</p>
02.	Alor			
03.	Lembata			
04.	Manggarai Barat			
05.	Timor Tengah Selatan			
06.	Sumba Barat Daya			
07.	Malaka	Sedang	Prioritas 2	
08.	Flores Timur			
09.	Ende			
10.	Nagekeo			
11.	Sikka			
12.	Manggarai Timur			
13.	Manggarai			
14.	Sumba Barat			
15.	Rote Ndao			
16.	Kupang			
17.	Belu	Tinggi	Prioritas 3	
18.	Ngada			
19.	Kota Kupang			
20.	Sabu Raijua			
21.	Sumba Tengah			
22.	Timor Tengah Utara			
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Ketersediaan – Tematik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Ketersediaan - Tematik Pendidikan
01.	Timor Tengah Selatan	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya jumlah ruang kelas di beberapa kabupaten/kota untuk semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA untuk seluruh rombongan belajar; Tingkat kerusakan ruang kelas relatif tinggi di semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA; Rasio siswa/guru relatif masih belum mencukupi di semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA di beberapa kabupaten/kota; Kualifikasi guru minimal sarjana relatif sudah mencukupi, untuk semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Pendidikan dasar dan menengah; Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan unit sekolah baru (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA); Pembangunan Ruang Kelas Baru (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA); Rehabilitasi ruang belajar; Renovasi sekolah; Perekrutan guru PNS; Pemberian beasiswa bagi guru; Sertifikasi guru; Peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Kemen PAN RB; Pemerintah Daerah.
02.	Sumba Barat Daya			
03.	Sumba Barat			
04.	Malaka	Sedang	Prioritas 2	
05.	Sumba Timur			
06.	Alor			
07.	Lembata			
08.	Sikka			
09.	Manggarai Barat			
10.	Manggarai Timur			
11.	Manggarai			
12.	Ngada			
13.	Rote Ndao			
14.	Kupang			
15.	Timor Tengah Utara			
16.	Flores Timur	Tinggi	Prioritas 3	
17.	Ende			
18.	Nagekeo			
19.	Belu			
20.	Kota Kupang			
21.	Sabu Raijua			
22.	Sumba Tengah			
<p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

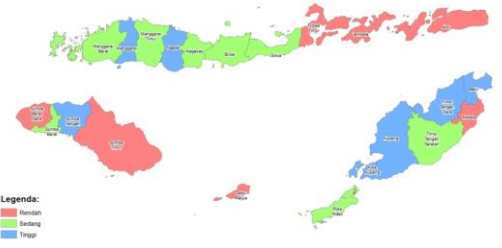
Hasil Analisis Kategori Aksesibilitas – Tematik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Aksesibilitas - Tematik Pendidikan
01.	Sumba Timur	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jarak dari desa ke sekolah, di beberapa kabupaten/kota masih relatif jauh. Minimnya kondisi jalan desa yang beraspal. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Pendidikan dasar dan menengah; Pembangunan jalan dan jembatan; Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan; Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan unit sekolah baru (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA) di setiap desa/kelurahan; Pembangunan dan perbaikan jalan desa; Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Kementerian Perhubungan; Pemerintah Daerah.
02.	Manggarai Barat			
03.	Sumba Barat Daya			
04.	Alor	Sedang	Prioritas 2	
05.	Lembata			
06.	Ende			
07.	Nagekeo			
08.	Timor Tengah Selatan			
09.	Belu			
10.	Rote Ndao			
11.	Sumba Tengah			
12.	Malaka	Tinggi	Prioritas 3	
13.	Flores Timur			
14.	Sikka			
15.	Manggarai Timur			
16.	Manggarai			
17.	Ngada			
18.	Kota Kupang			
19.	Sabu Raijua			
20.	Sumba Barat			
21.	Kupang			
22.	Timor Tengah Utara			
 <p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

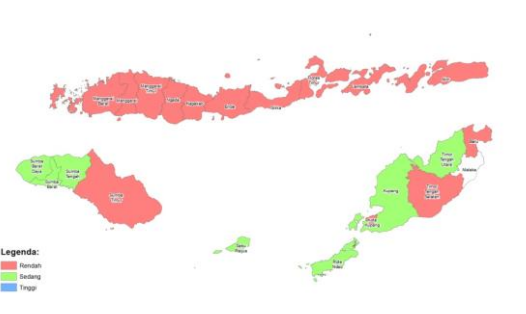
Hasil Analisis Kategori Keterjangkauan – Tematik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keterjangkauan - Tematik Pendidikan
01.	Kupang	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rata-rata biaya pendidikan relatif dapat terjangkau di semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA, walaupun demikian di beberapa kabupaten/kota biaya pendidikan masih relatif tinggi. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Pendidikan dasar dan menengah; Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Pemberian bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP); Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Pemerintah Daerah.
02.	Ende	Sedang	Prioritas 2	
03.	Nagekeo			
04.	Sikka			
05.	Manggarai			
06.	Sumba Barat			
07.	Malaka	Tinggi	Prioritas 3	
08.	Sumba Timur			
09.	Alor			
10.	Lembata			
11.	Flores Timur			
12.	Manggarai Barat			
13.	Timor Tengah Selatan			
14.	Manggarai Timur			
15.	Belu			
16.	Ngada			
17.	Kota Kupang			
18.	Sumba Barat Daya			
19.	Sabu Raijua			
20.	Rote Ndao			
21.	Sumba Tengah			
22.	Timor Tengah Utara			
 <p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keberlanjutan – Tematik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keberlanjutan - Tematik Pendidikan	
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.	Malaka Sumba Timur Alor Lembata Flores Timur Sumba Barat Daya Sabu Raijua	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih tingginya jumlah siswa usia sekolah yang harusnya bersekolah di beberapa kabupaten/kota, untuk semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Pendidikan dasar dan menengah. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan proporsi anggaran pendidikan dasar dan menengah; Peningkatan layanan pendidikan. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Pemerintah Daerah. 	
08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15.	Ende Nagekeo Sikka Manggarai Barat Timor Tengah Selatan Manggarai Timur Sumba Barat Rote Ndao	Sedang	Prioritas 2		
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.	Manggarai Belu Ngada Kota Kupang Kupang Sumba Tengah Timor Tengah Utara	Tinggi	Prioritas 3		
 <p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>					
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.					Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Stabilitas – Tematik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Stabilitas - Tematik Pendidikan
01.	Sumba Timur	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks resiko bencana di beberapa kabupaten/kota relatif tinggi. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Mitigasi bencana. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan dan pengurangan risiko bencana; - Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana; - Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanggulangannya bila terjadi bencana; - Pemasangan sistem peringatan dini; - Pembentukan desa tangguh bencana; - Peningkatan sosialisasi informasi kebencanaan (budaya sadar bencana); - Mempersiapkan jalur evakuasi bila terjadi bencana. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); - Pemerintah Daerah.
02.	Alor			
03.	Lembata			
04.	Flores Timur			
05.	Ende			
06.	Nagekeo			
07.	Sikka			
08.	Manggarai Barat			
09.	Timor Tengah Selatan			
10.	Manggarai Timur			
11.	Manggarai			
12.	Belu			
13.	Ngada			
14.	Kota Kupang			
15.	Sumba Barat Daya	Sedang	Prioritas 2	
16.	Sabu Raijua			
17.	Sumba Barat			
18.	Rote Ndao			
19.	Kupang			
20.	Sumba Tengah			
21.	Timor Tengah Utara			
 <p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

4.2

Tematik:

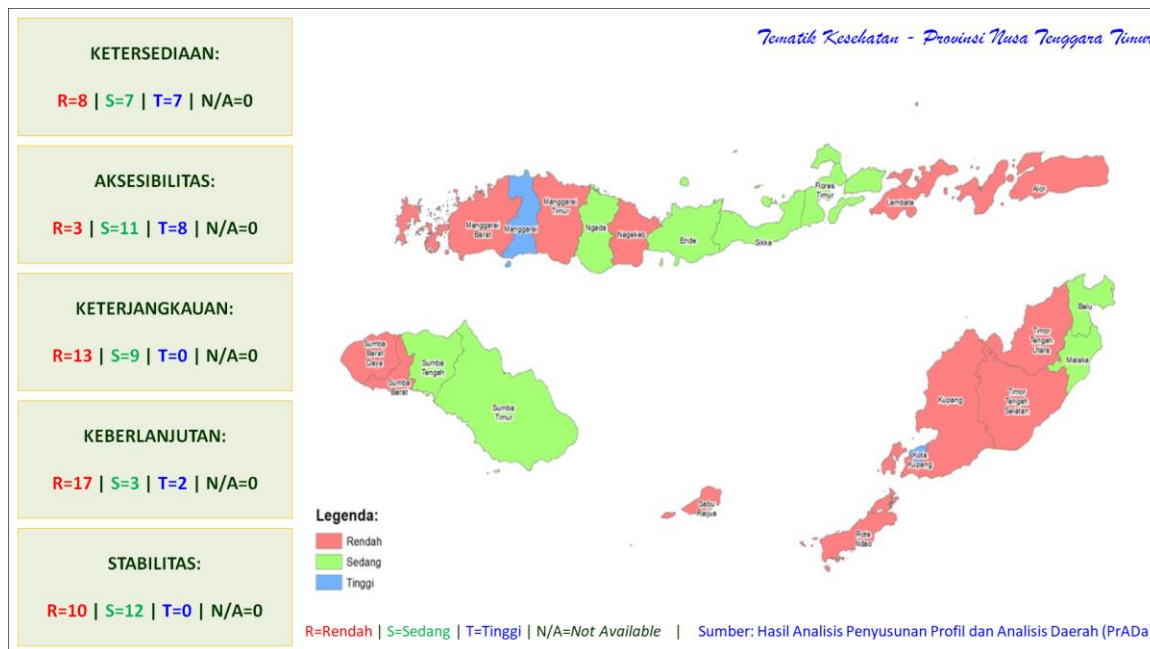
Kesehatan

Provinsi Nusa Tenggara Timur



Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
Kategori	Komponen	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga Kesehatan • Sarana Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio bidan per 100.000 penduduk; • Rasio dokter per 100.000 penduduk; • Rasio tenaga kesehatan lain per 100.000 penduduk. • Rasio posyandu per 3.000 penduduk; • Rasio puskesmas per 120.000 penduduk; • Rasio puskesmas pembantu per 3.000 penduduk; • Rasio rumah sakit per 240.000 penduduk.
<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Kedekatan dengan fasilitas kesehatan terdekat 	<ul style="list-style-type: none"> • Jarak ke puskesmas rawat inap; • Jarak ke puskesmas tanpa rawat inap; • Jarak ke puskesmas pembantu; • Jarak ke rumah sakit; • Jarak ke puskesmas praktik dokter.
<ul style="list-style-type: none"> • Keterjangkauan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan BPJS kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentase kepemilikan BPJS kesehatan.
<ul style="list-style-type: none"> • Keberlanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penunjang ketersediaan tenaga kesehatan pada masa mendatang 	<ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan perguruan tinggi di daerah yang memiliki jurusan dibidang kesehatan.
<ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Resiko bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) kabupaten/kota.

Hasil Analisis Tematik Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur



No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Kesehatan
01.	Kupang	Rendah	Prioritas 1	<p style="text-align: center;">RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK</p> <p style="text-align: center;">KESEHATAN</p> <p style="text-align: center;">KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI</p> <p style="text-align: center;">NUSA TENGGARA TIMUR</p> <p style="text-align: center;">DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI</p> <p style="text-align: center;">KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS, RELATIF</p> <p style="text-align: center;">SEDANG</p> <p style="text-align: center;">RENDAH : 7 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">SEDANG : 9 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">TINGGI : 6 KABUPATEN/KOTA</p>
02.	Manggarai Barat			
03.	Rote Ndao			
04.	Sabu Raijua			
05.	Sumba Barat			
06.	Timor Tengah Selatan			
07.	Timor Tengah Utara			
08.	Alor	Sedang	Prioritas 2	
09.	Flores Timur			
10.	Lembata			
11.	Malaka			
12.	Manggarai Timur			
13.	Nagekeo			
14.	Sikka			
15.	Sumba Barat Daya			
16.	Sumba Tengah			
17.	Belu	Tinggi	Prioritas 3	
18.	Ende			
19.	Kota Kupang			
20.	Manggarai			
21.	Ngada			
22.	Sumba Timur			

Sumber: Diolah dari berbagai sumber. Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Ketersediaan – Tematik Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Ketersediaan - Tematik Kesehatan	
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.	Kupang Manggarai Barat Nagekeo Rote Ndao Sabu Raijua Sumba Barat Timor Tengah Selatan Timor Tengah Utara	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya jumlah tenaga dokter, perawat dan bidan; • Belum meratanya penempatan dokter; • Belum meratanya fasilitas pelayanan kesehatan di daerah pedalaman, perbatasan dan terpencil; • Masih minimnya, kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelayanan kesehatan. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan; - Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan jaringannya. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Kesehatan; - Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi; - Pemerintah Daerah. 	
09. 10. 11. 12. 13. 14. 15.	Belu Flores Timur Kota Kupang Malaka Manggarai Sikka Sumba Barat Daya	Sedang	Prioritas 2		
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.	Alor Ende Lembata Manggarai Timur Ngada Sumba Tengah Sumba Timur	Tinggi	Prioritas 3		
<p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>					
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.					Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Aksesibilitas – Tematik Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Aksesibilitas - Tematik Kesehatan	
01. 02. 03.	Alor Manggarai Barat Manggarai Timur	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya infrastruktur pendukung untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan; <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan infrastruktur pendukung. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pembangunan infrastruktur; • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Perhubungan; - Kementerian Kesehatan; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. - Pemerintah Daerah. 	
04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14.	Ende Kupang Lembata Nagekeo Rote Ndao Sabu Raijua Sumba Barat Sumba Tengah Sumba Timur Timor Tengah Selatan Timor Tengah Utara	Sedang	Prioritas 2		
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.	Belu Flores Timur Kota Kupang Malaka Manggarai Ngada Sikka Sumba Barat Daya	Tinggi	Prioritas 3		
<p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>					
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.					Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

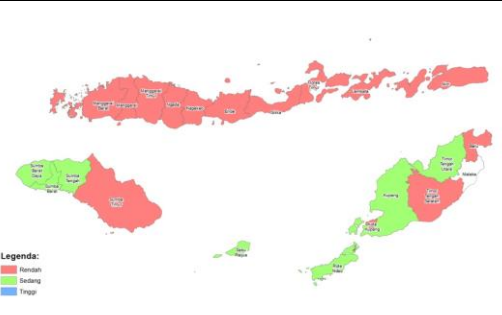
Hasil Analisis Kategori Keterjangkauan – Tematik Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keterjangkauan - Tematik Kesehatan
01.	Alor	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya kepemilikan BPJS kesehatan. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi BPJS kesehatan. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelayanan BPJS kesehatan. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Kesehatan; - Pemerintah Daerah.
02.	Belu			
03.	Flores Timur			
04.	Lembata			
05.	Malaka			
06.	Manggarai			
07.	Manggarai Barat			
08.	Manggarai Timur			
09.	Ngada			
10.	Sikka			
11.	Sumba Barat Daya			
12.	Timor Tengah Selatan			
13.	Timor Tengah Utara			
14.	Ende	Sedang	Prioritas 2	
15.	Kupang			
16.	Kota Kupang			
17.	Nagekeo			
18.	Rote Ndao			
19.	Sabu Raijua			
20.	Sumba Barat			
21.	Sumba Tengah			
22.	Sumba Timur			
<p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keberlanjutan – Tematik Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keberlanjutan - Tematik Kesehatan
01.	Alor	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya perguruan tinggi/akademi di daerah yang memiliki jurusan bidang kesehatan. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan SDM kesehatan. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dan/atau peningkatan kuantitas dan kualitas jurusan bidang kesehatan pada perguruan tinggi/akademi di daerah. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Kesehatan; - Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi; - Pemerintah Daerah.
02.	Ende			
03.	Kupang			
04.	Lembata			
05.	Malaka			
06.	Manggarai Barat			
07.	Manggarai Timur			
08.	Nagekeo			
09.	Ngada			
10.	Rote Ndao			
11.	Sabu Raijua			
12.	Sikka			
13.	Sumba Barat			
14.	Sumba Barat Daya			
15.	Sumba Tengah			
16.	Timor Tengah Selatan			
17.	Timor Tengah Utara			
18.	Belu	Sedang	Prioritas 2	
19.	Flores Timur			
20.	Sumba Timur			
21.	Kota Kupang	Tinggi	Prioritas 3	
22.	Manggarai			
<p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Stabilitas – Tematik Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Stabilitas - Tematik Kesehatan
01.	Flores Timur	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Indeks resiko bencana di beberapa kabupaten/kota relatif tinggi. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Mitigasi bencana. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Pencegahan dan pengurangan risiko bencana; Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana; Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanggulangannya bila terjadi bencana; Pemasangan sistem peringatan dini; Pembentukan desa tangguh bencana; Peningkatan sosialisasi informasi kebencanaan (budaya sadar bencana); Memperiapkan jalur evakuasi bila terjadi bencana. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); Pemerintah Daerah.
02.	Kupang			
03.	Lembata			
04.	Rote Ndao			
05.	Sabu Raijua			
06.	Sumba Barat			
07.	Sumba Barat Daya			
08.	Sumba Tengah			
09.	Sumba Timur			
10.	Timor Tengah Utara			
11.	Alor	Sedang	Prioritas 2	
12.	Belu			
13.	Ende			
14.	Kota Kupang			
15.	Malaka			
16.	Manggarai			
17.	Manggarai Barat			
18.	Manggarai Timur			
19.	Nagekeo			
20.	Ngada			
21.	Sikka			
22.	Timor Tengah Selatan			
 <p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

4.3

Tematik:

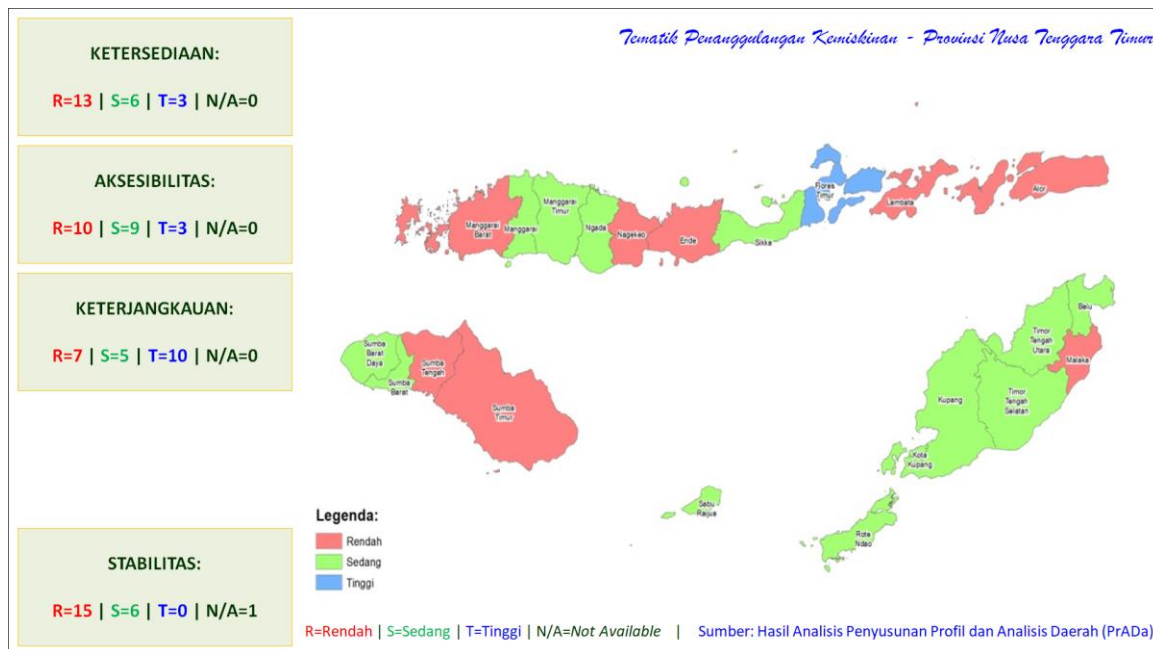
Penanggulangan Kemiskinan

Provinsi Nusa Tenggara Timur



Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
Kategori	Komponen	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penduduk miskin 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentase kemiskinan (P0); • Indeks kedalaman kemiskinan (P1); • Indeks keparahan kemiskinan (P2).
<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan dasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentase jumlah anak miskin yang bersekolah; • Presentase individu miskin yang memiliki penyakit kronis; • Presentase Rumah Tangga Miskin (RTM) yang memiliki rumah milik sendiri atau kontrak/sewa; • Presentase RTM yang menggunakan air minum layak; • Presentase RTM yang menggunakan jamban sendiri/bersama; • Presentase RTM yang menggunakan penerangan listrik (PLN dan non PLN); • Kondisi jalan mantab.
<ul style="list-style-type: none"> • Keterjangkauan 	<ul style="list-style-type: none"> • Luas Layanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi Program Keluarga Harapan (PKH); • Target PKH; • Presentase penerima PKH.
<ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Resiko bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) kabupaten/kota.

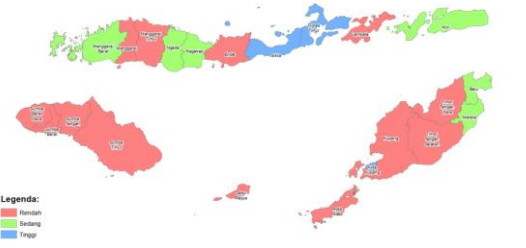
Hasil Analisis Kategori Tematik Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur



No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Penanggulangan Kemiskinan
01.	Alor	Rendah	Prioritas 1	<p style="text-align: center;">RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK</p> <p style="text-align: center;">PENANGGULANGAN KEMISKINAN</p> <p style="text-align: center;">KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI</p> <p style="text-align: center;">NUSA TENGGARA TIMUR</p> <p style="text-align: center;">DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI</p> <p style="text-align: center;">KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS, RELATIF</p> <p style="text-align: center;">SEDANG</p> <p style="text-align: center;">RENDAH : 8 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">SEDANG : 13 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">TINGGI : 1 KABUPATEN/KOTA</p>
02.	Ende			
03.	Lembata			
04.	Malaka			
05.	Manggarai Barat			
06.	Nagekeo			
07.	Sumba Tengah			
08.	Sumba Timur			
09.	Belu	Sedang	Prioritas 2	
10.	Kupang			
11.	Manggarai			
12.	Manggarai Timur			
13.	Ngada			
14.	Rote Ndao			
15.	Sabu Raijua			
16.	Sikka			
17.	Sumba Barat			
18.	Sumba Barat Daya			
19.	Timor Tengah Selatan			
20.	Timor Tengah Utara			
21.	Kota Kupang			
22.	Flores Timur	Tinggi	Prioritas 3	

Sumber: Diolah dari berbagai sumber. Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

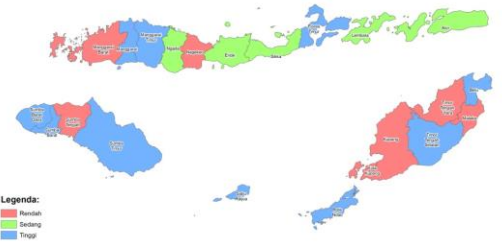
Hasil Analisis Kategori Ketersediaan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Ketersediaan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan
01.	Ende	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tingginya persentase penduduk miskin, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di beberapa kabupaten/kota. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan sosial; Perlindungan dan jaminan sosial; Penanganan fakir miskin. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat; Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT); Perlindungan sosial korban bencana alam; Perlindungan sosial korban bencana sosial; Jaminan sosial keluarga; Penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Sosial; Pemerintah Daerah.
02.	Kupang			
03.	Lembata			
04.	Manggarai			
05.	Manggarai Timur			
06.	Rote Ndao			
07.	Sabu Raijua			
08.	Sumba Barat			
09.	Sumba Barat Daya			
10.	Sumba Tengah			
11.	Sumba Timur			
12.	Timor Tengah Selatan			
13.	Timor Tengah Utara			
14.	Alor	Sedang	Prioritas 2	
15.	Belu			
16.	Malaka			
17.	Manggarai Barat			
18.	Nagekeo			
19.	Ngada			
20.	Flores Timur	Tinggi	Prioritas 3	
21.	Sikka			
22.	Kota Kupang			
 <p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Aksesibilitas - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Aksesibilitas - Tematik Penanggulangan Kemiskinan	
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10.	Alor Belu Ende Lembata Malaka Manggarai Barat Rote Ndao Sumba Barat Sumba Tengah Sumba Timur	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar masih perlu ditingkatkan, di beberapa kabupaten/kota. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Pendidikan dasar dan menengah; Penguatan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional; Pembinaan pelayanan kesehatan; Pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman; Pengembangan perumahan; Peningkatan layanan ketenagalistrikan. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Pemberian bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP); Pengembangan pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS); Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan; Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); Pembangunan rumah susun; Penyediaan sanitasi layak; Peningkatan listrik desa. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Kementerian Kesehatan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) - Persero; Pemerintah Daerah. 	
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.	Manggarai Manggarai Timur Nagekeo Ngada Sabu Raijua Sikka Sumba Barat Daya Timor Tengah Selatan Kota Kupang	Sedang	Prioritas 2		
20. 21. 22.	Flores Timur Kupang Timor Tengah Utara	Tinggi	Prioritas 3		
<p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>					
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.					Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keterjangkauan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keterjangkauan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan	
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.	Kupang Malaka Manggarai Barat Nagekeo Sumba Tengah Timor Tengah Utara Kota Kupang	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Perlindungan dan jaminan sosial. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan tata kelola program perlindungan dan jaminan sosial; Peningkatan pengawasan pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Sosial; Pemerintah Daerah. 	
08. 09. 10. 11. 12.	Alor Ende Lembata Ngada Sikka	Sedang	Prioritas 2		
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.	Belu Flores Timur Manggarai Manggarai Timur Rote Ndao Sabu Raijua Sumba Barat Sumba Barat Daya Sumba Timur Timor Tengah Selatan	Tinggi	Prioritas 3		
 <p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>					
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.					Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Stabilitas - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Stabilitas - Tematik Penanggulangan Kemiskinan
02.	Alor	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks resiko bencana di beberapa kabupaten/kota relatif tinggi. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Mitigasi bencana. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan dan pengurangan risiko bencana; - Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana; - Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanggulangannya bila terjadi bencana; - Pemasangan sistem peringatan dini; - Pembentukan desa tangguh bencana; - Peningkatan sosialisasi informasi kebencanaan (budaya sadar bencana); - Mempersiapkan jalur evakuasi bila terjadi bencana. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); - Pemerintah Daerah.
03.	Belu			
04.	Ende			
05.	Flores Timur			
06.	Lembata			
07.	Manggarai			
08.	Manggarai Barat			
09.	Manggarai Timur			
10.	Nagekeo			
11.	Ngada			
12.	Sabu Raijua			
13.	Sikka			
14.	Sumba Timur			
15.	Timor Tengah Selatan			
16.	Kota Kupang			
17.	Kupang			
18.	Rote Ndao			
19.	Sumba Barat			
20.	Sumba Barat Daya			
21.	Sumba Tengah			
22.	Timor Tengah Utara			
<p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

4.4

Tematik:

Perumahan dan Permukiman

Provinsi Nusa Tenggara Timur

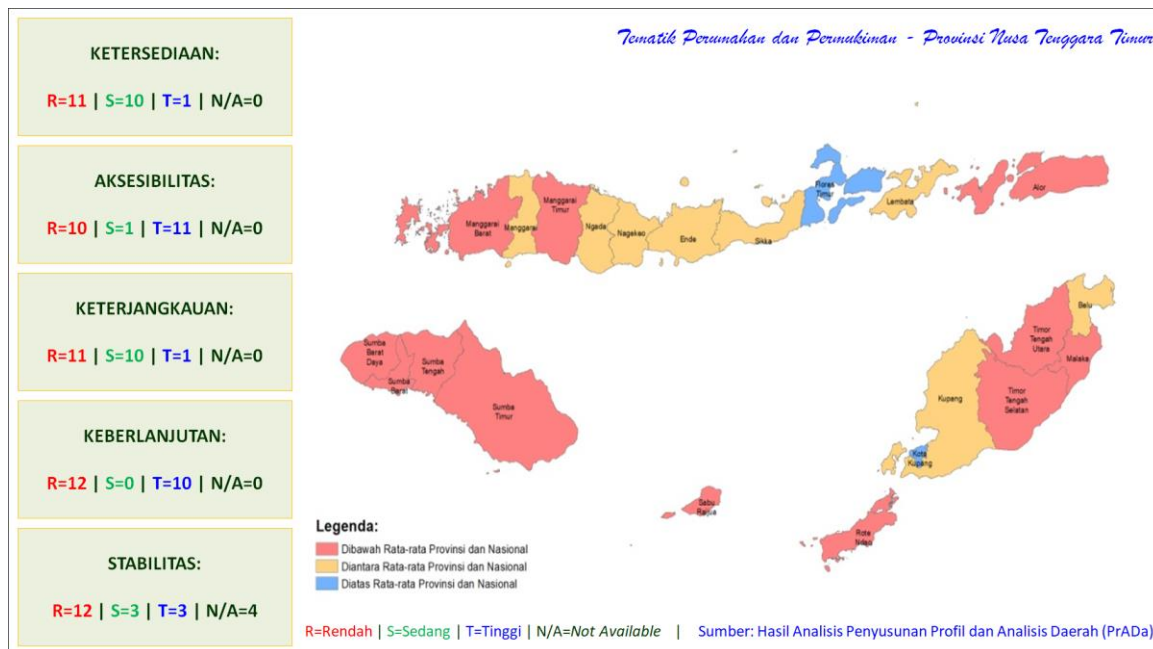


Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur		
Kategori	Komponen	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Persampahan • Ruang publik • Angkutan umum • Telekomunikasi • Jasa ekspedisi • Pertokoan • Keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat buang sampah sebagian besar keluarga; • Tempat penampungan sampah sementara (TPS). • Keberadaan ruang publik bagi warga untuk bersantai atau bermain tanpa perlu membayar. • Keberadaan angkutan umum yang melewati desa atau kelurahan; • Operasional angkutan umum yang melewati desa atau kelurahan; • Jam operasi angkutan umum yang melewati desa atau kelurahan. • Keberadaan telepon koin dan kartu yang masih aktif atau berfungsi; • Keberadaan base transceiver station (BTS) atau menara telepon seluler; • Kondisi sinyal telepon seluler atau handphone. • Keberadaan warung internet (warnet) di desa atau kelurahan; • Kantor pos, pos pembantu, rumah pos; • Keberadaan pelayanan pos keliling; • Keberadaan perusahaan jasa ekspedisi swasta. • Keberadaan kelompok pertokoan. • Keberadaan pos polisi termasuk kantor polisi.

Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur		
Kategori	Komponen	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses ke sumber air untuk minum • Akses ke sumber air untuk memasak • Akses ke sumber air untuk mandi, cuci, dll. • Sanitasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum; • Jarak tempat pembuangan limbah, kotoran, tinja dengan sumber air untuk minum. • Sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk memasak; • Jarak tempat pembuangan limbah, kotoran, tinja dengan sumber air untuk memasak. • Sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk mandi, cuci, dll; • Jarak tempat pembuangan limbah, kotoran, tinja dengan sumber air untuk mandi, cuci, dll. • Fasilitas tempat buang air besar, dan siapa saja yang menggunakan; • Jenis jamban, kloset yang digunakan rumah tangga; • Lokasi tempat pembuangan akhir tinja.
<ul style="list-style-type: none"> • Keterjangkauan 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi • Status rumah • Kondisi rumah 	<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga yang berlangganan telepon kabel. • Status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati. • Bahan bangunan utama atap rumah terluas; • Bahan bangunan utama dinding rumah terluas; • Bahan bangunan utama lantai rumah terluas.

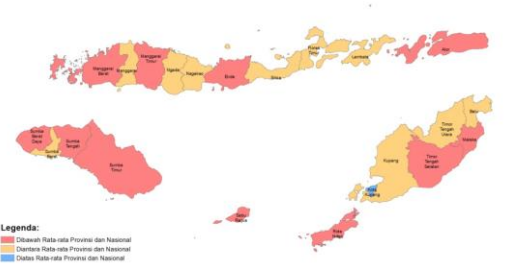
Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur		
Kategori	Komponen	Indikator
	<ul style="list-style-type: none"> ● Air isi ulang ● Perpipahan ● Penerangan ● Energi memasak 	<ul style="list-style-type: none"> ● Cara memperoleh air minum yang bersumber dari air kemasan bermerk, air isi ulang dan leding eceran. ● Sumber air minum, mandi, cuci, memasak menggunakan perpipaan atau hidran umum. ● Sumber penerangan utama rumah. ● Jenis bahan bakar utama yang digunakan untuk memasak.
<ul style="list-style-type: none"> ● Keberlanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Limbah ● Wilayah sutet ● Permukiman kumuh ● Modal sosial 	<ul style="list-style-type: none"> ● Keberadaan permukiman di bantaran sungai; ● Pembuangan limbah pabrik, industri, usaha ke sungai. ● Keberadaan wilayah desa atau kelurahan yang dilalui saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet). ● Keberadaan permukiman kumuh di desa atau kelurahan. ● Keberadaan kebiasaan gotong royong warga di desa atau kelurahan.
<ul style="list-style-type: none"> ● Stabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mitigasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ● Keberadaan sistem peringatan dini bencana alam di desa atau kelurahan; ● Keberadaan perlengkapan keselamatan jika terjadi bencana alam di desa atau kelurahan; ● Keberadaan jalur evakuasi jika terjadi bencana alam di desa atau kelurahan.

Hasil Analisis Kategori Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur



No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Perumahan dan Permukiman
01.	Alor	Rendah	Prioritas 1	<p style="text-align: center;">RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK</p> <p style="text-align: center;">PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</p> <p style="text-align: center;">KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI</p> <p style="text-align: center;">NUSA TENGGARA TIMUR</p> <p style="text-align: center;">DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI</p> <p style="text-align: center;">KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS, RELATIF</p> <p style="text-align: center;">RENDAH</p> <p style="text-align: center;">RENDAH : 12 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">SEDANG : 8 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">TINGGI : 2 KABUPATEN/KOTA</p>
02.	Malaka			
03.	Manggarai Barat			
04.	Manggarai Timur			
05.	Rote Ndao			
06.	Sabu Raijua			
07.	Sumba Barat			
08.	Sumba Barat Daya			
09.	Sumba Tengah			
10.	Sumba Timur			
11.	Timor Tengah Selatan			
12.	Timor Tengah Utara			
13.	Belu	Sedang	Prioritas 2	
14.	Ende			
15.	Kupang			
16.	Lembata			
17.	Manggarai			
18.	Nagekeo			
19.	Ngada			
20.	Sikka			
21.	Flores Timur	Tinggi	Prioritas 3	
22.	Kota Kupang			
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

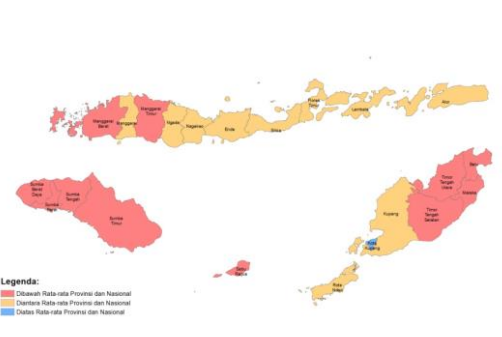
Hasil Analisis Kategori Ketersediaan - Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Ketersediaan - Tematik Perumahan dan Permukiman
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11.	Alor Ende Malaka Manggarai Barat Manggarai Timur Rote Ndao Sabu Raijua Sumba Barat Daya Sumba Tengah Sumba Timur Timor Tengah Selatan	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke dalam lubang, sungai, saluran irigasi, danau, laut, got dan selokan; Terbatasnya ketersediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS); Masih minimnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung kawasan perumahan dan permukiman untuk keperluan transportasi publik, telekomunikasi, ekspedisi, pertokoan/pasar, serta peningkatan keamanan di desa/kelurahan. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan fasilitas pendukung kawasan perumahan dan permukiman. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle); Penyediaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); Penyediaan prasarana dan sarana untuk keperluan transportasi publik, telekomunikasi, ekspedisi, pertokoan/pasar, serta peningkatan keamanan di desa/kelurahan. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Perdagangan; Kementerian Perindustrian; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Pemerintah Daerah.
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.	Belu Flores Timur Kupang Lembata Manggarai Nagekeo Ngada Sikka Sumba Barat Timor Tengah Utara	Sedang	Prioritas 2	
22.	Kota Kupang	Tinggi	Prioritas 3	
 <p>Legenda: ■ Daerah Rata-rata Provinsi dan Nasional ■ Daerah Rata-rata Provinsi ■ Daerah Rata-rata Nasional</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

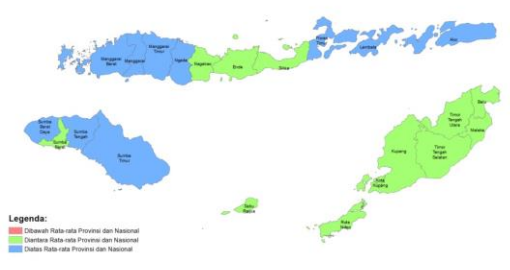
Hasil Analisis Kategori Aksesibilitas - Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Aksesibilitas - Tematik Perumahan dan Permukiman
01.	Malaka	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih banyak rumah tangga yang memiliki akses ke sumber air minum utama yang berasal dari (1) sumur bor/pompa, mata air terlindung, yang jaraknya kurang dari 10 meter; (2) mata air tak terlindung, air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi); Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan fasilitas buang air besar, karena faktor sosial budaya, atau dikarenakan tidak adanya fasilitas tempat buang air besar; Terbatasnya lokasi pembuangan akhir tinja yang menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan akhirnya di buang ke kolam/sawah/sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun, dan lainnya. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan akses ke sumber air untuk minum dan sanitasi layak. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan akses sumber air untuk minum bagi rumah tangga yang berasal dari leding; Optimalisasi ketersediaan air baku; Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); Meningkatkan pelayanan kepada rumah tangga dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat; Membangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala komunal; Meningkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja melalui pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT). Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Kesehatan; BUMN/BUMD; Pemerintah Daerah.
02.	Manggarai Barat			
03.	Manggarai Timur			
04.	Rote Ndao			
05.	Sabu Raijua			
06.	Sumba Barat			
07.	Sumba Barat Daya			
08.	Sumba Tengah			
09.	Sumba Timur			
10.	Timor Tengah Selatan			
11.	Alor	Sedang	Prioritas 2	
12.	Belu	Tinggi	Prioritas 3	
13.	Ende			
14.	Flores Timur			
15.	Kupang			
16.	Lembata			
17.	Manggarai			
18.	Nagekeo			
19.	Ngada			
20.	Sikka			
21.	Timor Tengah Utara			
22.	Kota Kupang			
<p>Legenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rendah Rata-rata Provinsi dan Nasional ■ Sedang Rata-rata Provinsi dan Nasional ■ Tinggi Rata-rata Provinsi dan Nasional 				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keterjangkauan - Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keterjangkauan - Tematik Perumahan dan Permukiman
01.	Belu	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rendahnya kualitas bangunan rumah sebagai tempat perlindungan dari panas dan hujan, seperti (1) bahan bangunan utama atap rumah terluas berasal dari asbes, seng, bambu, kayu/sirap, jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia, dan lainnya; (2) bahan bangunan utama dinding rumah terluas berasal dari plesteran anyaman bambu / kawat, kayu, anyaman bambu, batang kayu, dan bambu; (3) bahan bangunan utama lantai rumah terluas berasal dari bambu, kayu / papan kualitas rendah, tanah, dan lainnya; Masih terbatasnya rumah tangga yang menggunakan sumber air untuk minum, memasak, mandi dan cuci, berasal dari perpipahan atau hidran umum; Masih terbatasnya rumah tangga yang menggunakan penerangan utama rumah berasal dari listrik; Masih banyak rumah tangga yang menggunakan bahan bakar utamanya berasal dari kayu bakar. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Bantuan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah; Memperluas jaringan distribusi air bersih bagi rumah tangga; Subsidi listrik bagi masyarakat berpenghasilan rendah; Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Pemerintah Daerah.
02.	Malaka			
03.	Manggarai Barat			
04.	Manggarai Timur			
05.	Sabu Raijua			
06.	Sumba Barat			
07.	Sumba Barat Daya			
08.	Sumba Tengah			
09.	Sumba Timur			
10.	Timor Tengah Selatan			
11.	Timor Tengah Utara			
12.	Alor	Sedang	Prioritas 2	
13.	Ende			
14.	Flores Timur			
15.	Kupang			
16.	Lembata			
17.	Manggarai			
18.	Nagekeo			
19.	Ngada			
20.	Rote Ndao			
21.	Sikka			
22.	Kota Kupang	Tinggi	Prioritas 3	
 <p>Legenda: ■ Distrik Kabupaten Provinsi dan Nasional ■ Distrik Kabupaten Provinsi ■ Distrik Kabupaten Provinsi dan Nasional</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keberlanjutan - Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keberlanjutan - Tematik Perumahan dan Permukiman
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.	Belu Ende Kupang Malaka Nagekeo Rote Ndao Sabu Raijua Sikka Sumba Barat Timor Tengah Selatan Timor Tengah Utara Kota Kupang	Sedang	Prioritas 2	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat permukiman di bantaran sungai; • Banyak rumah tangga dan industri yang membuang limbah ke sungai; • Terdapat wilayah desa atau kelurahan yang dilalui saluran udara tegangan ekstra tinggi (suted); • Terdapat permukiman kumuh di desa atau kelurahan. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Relokasi permukiman penduduk dan pemberdayaan masyarakat. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Relokasi permukiman dari bantaran sungai dan kumuh; - Pembangunan sistem pengelolaan limbah terpadu. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Pemerintah Daerah.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.	Alor Flores Timur Lembata Manggarai Manggarai Barat Manggarai Timur Ngada Sumba Barat Daya Sumba Tengah Sumba Timur	Tinggi	Prioritas 3	
 <p>Legenda: ■ Daerah Rata-rata Provinsi dan Nasional ■ Daerah Rata-rata Provinsi dan Nasional ■ Daerah Rata-rata Provinsi dan Nasional</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Stabilitas - Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Stabilitas - Tematik Perumahan dan Permukiman
01.	Ngada	N/A	-	1 Permasalahan Utama: <ul style="list-style-type: none"> • Minimnya keberadaan sistem peringatan dini bencana alam di desa atau kelurahan; • Minimnya keberadaan perlengkapan keselamatan jika terjadi bencana alam di desa atau kelurahan; • Minimnya keberadaan jalur evakuasi jika terjadi bencana alam di desa atau kelurahan.
02.	Sabu Raijua	N/A	-	
03.	Sumba Barat	N/A	-	
04.	Sumba Barat Daya	N/A	-	
05.	Alor	Rendah	Prioritas 1	2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Mitigasi bencana. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan dan pengurangan risiko bencana; - Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana; - Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanggulangannya bila terjadi bencana; - Pemasangan sistem peringatan dini; - Pembentukan desa tangguh bencana; - Peningkatan sosialisasi informasi kebencanaan (budaya sadar bencana); - Mempersiapkan jalur evakuasi bila terjadi bencana. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); - Pemerintah Daerah.
06.	Belu			
07.	Kupang			
08.	Manggarai			
09.	Manggarai Barat			
10.	Manggarai Timur			
11.	Nagekeo			
12.	Rote Ndao			
13.	Sumba Tengah			
14.	Sumba Timur			
15.	Timor Tengah Selatan			
17.	Ende			
18.	Flores Timur			
19.	Timor Tengah Utara	Tinggi	Prioritas 3	
20.	Lembata			
21.	Malaka			
22.	Sikka			

Legenda:

- Tidak Ada Data
- Daerah Risiko Tinggi Provinsi dan Nasional
- Daerah Risiko Sedang Provinsi dan Nasional
- Daerah Risiko Rendah Provinsi dan Nasional

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

4.5

Tematik:

Ketahanan Pangan

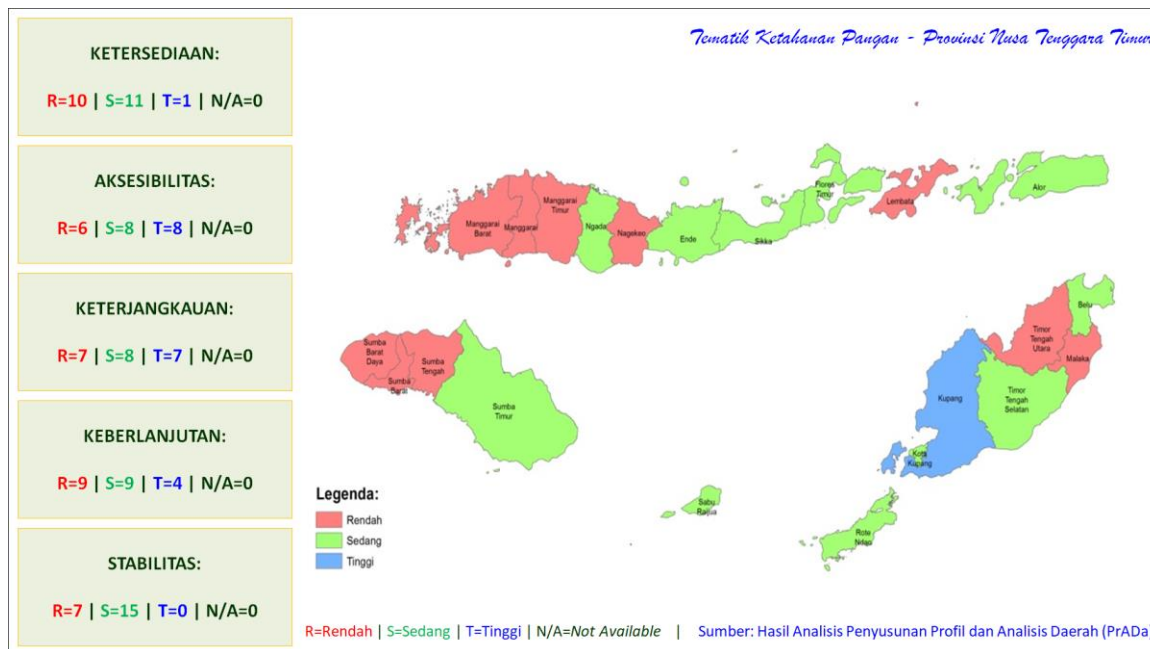
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
Kategori	Komponen	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Produktivitas pangan • Produksi perikanan • Produksi peternakan • Konsumsi sereal • Lahan irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Produktivitas padi sawah; • Produktivitas padi ladang; • Produktivitas jagung; • Produktivitas kacang hijau; • Produktivitas kacang tanah; • Produktivitas kedelai; • Produktivitas ubi kayu; • Produktivitas ubi jalar. • Produksi perikanan tangkap; • Produksi perikanan budidaya. • Produksi unggas; • Produksi ternak. • Konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih sereal. • Rasio luas lahan sawah, tegal/kebun, ladang/huma terhadap luas wilayah; • Rasio luas sawah irigasi dibandingkan luas total sawah.
<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur • Akses ke pasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks kepadatan jalan; • Jalan mantab; • Rasio desa dengan bangunan pasar permanen/semi permanen; • Rata-rata perkiraan jarak ke pasar dengan bangunan permanen/semi permanen terdekat.

Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
Kategori	Komponen	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Keterjangkauan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemiskinan • Pengeluaran perkapita • Kesehatan bayi 	<ul style="list-style-type: none"> • Angka kemiskinan; • Indeks kedalaman kemiskinan (P1); • Indeks keparahan kemiskinan (P2). • Pengeluaran perkapita. • Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR); • Bayi Gizi Buruk.
<ul style="list-style-type: none"> • Keberlanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga kerja • Lahan pertanian • Populasi peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio rumah tangga tanaman pangan (RTTP); • Rasio rumah tangga perikanan budidaya; • Rasio rumah tangga perikanan tangkap. • Rasio luas lahan terhadap RTTP; • Laju konversi lahan pertanian rata-rata (dalam 5 tahun atau lebih). • Populasi ternak; • Populasi unggas.
<ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Mitigasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerawanan bencana banjir; • Kerawanan bencana tanah longsor; • Kerawanan bencana cuaca ekstrem; • Kerawanan bencana kekeringan.

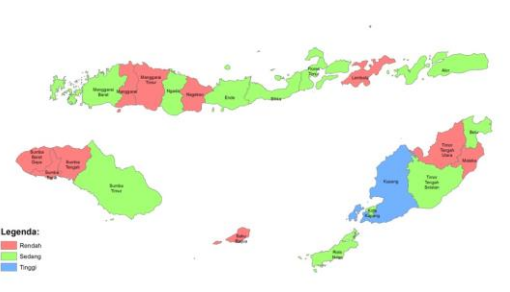
Hasil Analisis Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur



No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Ketahanan Pangan
01.	Sumba Barat	Rendah	Prioritas 1	<p style="text-align: center;">RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK</p> <p style="text-align: center;">KETAHANAN PANGAN</p> <p style="text-align: center;">KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI</p> <p style="text-align: center;">NUSA TENGGARA TIMUR</p> <p style="text-align: center;">DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI</p> <p style="text-align: center;">KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS, RELATIF</p> <p style="text-align: center;">RENDAH HINGGA SEDANG</p> <p style="text-align: center;">RENDAH : 10 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">SEDANG : 11 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">TINGGI : 1 KABUPATEN/KOTA</p>
02.	Timor Tengah Utara			
03.	Lembata			
04.	Manggarai			
05.	Manggarai Barat			
06.	Sumba Tengah			
07.	Sumba Barat Daya			
08.	Nagekeo			
09.	Manggarai Timur			
10.	Malaka			
11.	Sumba Timur	Sedang	Prioritas 2	
12.	Timor Tengah Selatan			
13.	Belu			
14.	Alor			
15.	Flores Timur			
16.	Sikka			
17.	Ende			
18.	Ngada			
19.	Rote Ndao			
20.	Sabu Raijua			
21.	Kota Kupang			
22.	Kupang	Tinggi	Prioritas 3	

Sumber: Diolah dari berbagai sumber. Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Ketersediaan - Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Ketersediaan - Tematik Ketahanan Pangan	
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10.	Timor Tengah Utara Lembata Manggarai Sumba Tengah Sumba Barat Daya Nagekeo Manggarai Timur Sabu Raijua Malaka Sumba Barat	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya produktivitas padi sawah, padi ladang, jagung, kacang hijau, kacang tanah, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar; • Rendahnya produksi perikanan tangkap/budidaya; • Rendahnya produksi unggas/ternak; • Konsumsi serealial lebih tinggi dibandingkan produksi di dalam kabupaten/kota; • Rendahnya persentase luas lahan sawah, tegal/kebun, ladang/huma terhadap luas wilayah; • Rendahnya rasio sawah irigasi terhadap luas lahan sawah total. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Ketahanan pangan. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan produksi hasil pertanian; - Penerapan teknologi pertanian; - Pemberdayaan penyuluh pertanian; - Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya perikanan; - Peningkatan produksi peternakan dan penerapan teknologi peternakan; - Peningkatan ketahanan pangan; - Pembukaan sawah dan pembuatan saluran irigasi. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pertanian; - Kementerian Kelautan dan Perikanan; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Pemerintah Daerah. 	
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.	Sumba Timur Timor Tengah Selatan Belu Alor Flores Timur Sikka Ende Ngada Rote Ndao Manggarai Barat Kota Kupang	Sedang	Prioritas 2		
22.	Kupang	Tinggi	Prioritas 3		
 <p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>					
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.					Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Aksesibilitas - Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Aksesibilitas - Tematik Ketahanan Pangan	
01. 02. 03. 04. 05. 06.	Kupang Manggarai Barat Sumba Tengah Nagekeo Manggarai Timur Sabu Raijua	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kepadatan jalan (panjang ruas jalan per 100 km2 luas wilayah); • Rendahnya rasio jalan mantab; • Tingginya rasio desa tanpa bangunan permanen maupun semi permanen; • Jarak rata-rata desa ke pasar permanen/semi permanen terdekat terlampau jauh. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Ketahanan pangan. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan, pemeliharaan jalan; - Pembangunan pasar permanen/semi permanen; - Rehabilitasi bangunan pasar. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pertanian; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Kementerian Perdagangan; - Pemerintah Daerah. 	
07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14.	Sumba Timur Timor Tengah Selatan Lembata Sikka Ende Manggarai Sumba Barat Daya Malaka	Sedang	Prioritas 2		
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.	Sumba Barat Timor Tengah Utara Belu Alor Flores Timur Ngada Rote Ndao Kota Kupang	Tinggi	Prioritas 3		
<p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>					
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.					Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keterjangkauan - Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keterjangkauan - Tematik Ketahanan Pangan	
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.	Sumba Timur Timor Tengah Selatan Lembata Ende Rote Ndao Sumba Tengah Sabu Raijua	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya angka kemiskinan; • Tingginya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan; • Pengeluaran per kapita di wilayah kabupaten/kota masih berada di bawah rata-rata provinsi; • Rendahnya konsumsi kalori dan protein per kapita; • Angka bayi yang kekurangan gizi masih tinggi; • Tingginya persentase bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Penanggulangan kemiskinan. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan bantuan sosial bagi masyarakat miskin, khususnya yang bekerja di sektor pertanian. - Peningkatan kesehatan ibu dan bayi. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Sosial; - Kementerian Kesehatan; - Pemerintah Daerah. 	
08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15.	Kupang Timor Tengah Utara Belu Manggarai Sumba Barat Daya Manggarai Timur Malaka Sumba Barat	Sedang	Prioritas 2		
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.	Alor Flores Timur Sikka Ngada Manggarai Barat Nagekeo Kota Kupang	Tinggi	Prioritas 3		
<p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>					
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.					Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keberlanjutan - Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keberlanjutan - Tematik Ketahanan Pangan	
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.	Belu Lembata Sikka Manggarai Manggarai Barat Sumba Barat Daya Manggarai Timur Malaka Sumba Barat	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya persentase rumah tangga tanaman pangan, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap; • Rendahnya penguasaan lahan pertanian; • Tingginya laju konversi lahan pertanian; • Masih tingginya lahan potensial yang menganggur; • Rendahnya populasi ternak dan unggas. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan; • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kesejahteraan petani; - Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; - Penataan ruang; - Pemberian bibit ternak dan unggas; - Penanggulangan penyakit ternak dan unggas. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pertanian; - Kementerian Kelautan dan Perikanan; - Kementerian Agraria dan Tata Ruang; - Pemerintah Daerah. 	
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.	Sumba Timur Timor Tengah Selatan Timor Tengah Utara Flores Timur Ende Ngada Sumba Tengah Nagekeo Kota Kupang	Sedang	Prioritas 2		
19. 20. 21. 22.	Kupang Alor Rote Ndao Sabu Raijua	Tinggi	Prioritas 3		
<p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>					
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.					Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Stabilitas - Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Stabilitas - Tematik Ketahanan Pangan
01.	Kupang	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kerawanan bencana banjir; • Tingginya Kerawanan bencana Tanah longsor; • Tingginya Kerawanan bencana cuaca ekstrim; • Tingginya Kerawanan bencana kekeringan; <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Mitigasi bencana. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan dan pengurangan risiko bencana; - Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana; - Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanggulangannya bila terjadi bencana; - Pemasangan sistem peringatan dini; - Pembentukan desa tangguh bencana; - Peningkatan sosialisasi informasi kebencanaan (budaya sadar bencana); - Mempersiapkan jalur evakuasi bila terjadi bencana. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); - Pemerintah Daerah.
02.	Timor Tengah Utara			
03.	Belu			
04.	Alor			
05.	Ngada			
06.	Ende			
07.	Kota Kupang			
08.	Sumba Timur	Sedang	Prioritas 2	
09.	Timor Tengah Selatan			
10.	Flores Timur			
11.	Sikka			
12.	Rote Ndao			
13.	Manggarai Barat			
14.	Nagekeo			
15.	Sabu Raijua			
16.	Sumba Barat			
17.	Lembata			
18.	Manggarai			
19.	Sumba Tengah			
20.	Sumba Barat Daya			
21.	Manggarai Timur			
22.	Malaka			
<p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

4.6

Tematik:

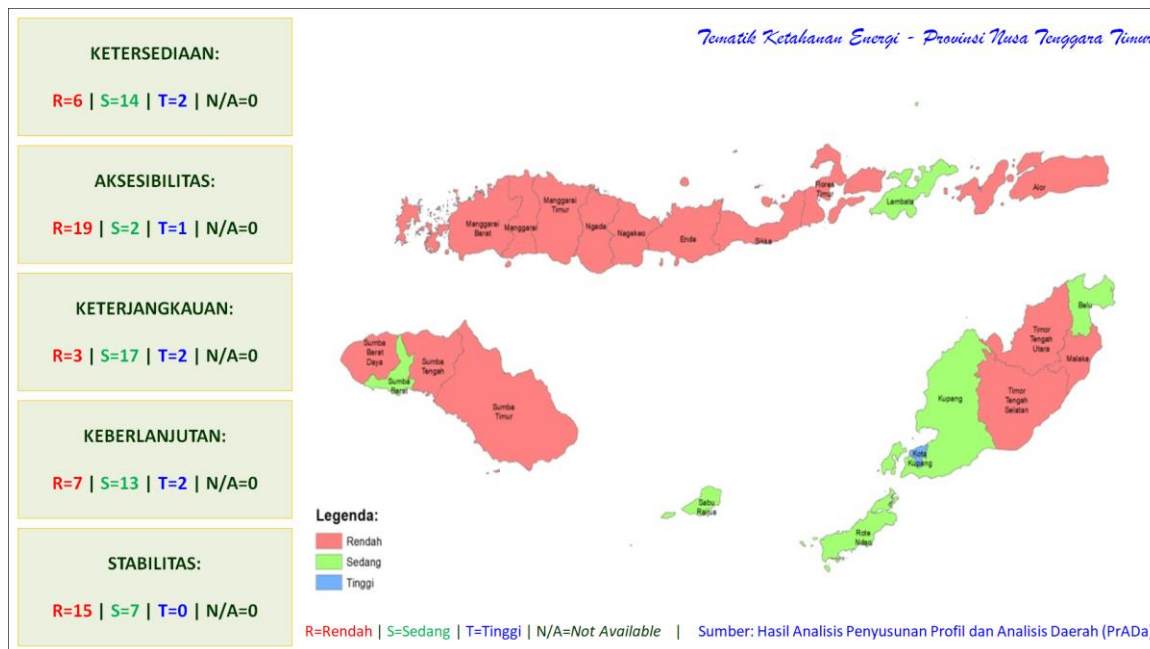
Ketahanan Energi

Provinsi Nusa Tenggara Timur



Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Ketahanan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur		
Kategori	Komponen	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan 		<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga pengguna listrik PLN; • Penerangan di jalan utama desa/ kelurahan (listrik diusahakan pemerintah).
<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas 		<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga pengguna listrik PLN; • Keluarga pengguna listrik Non PLN; • Penerangan di jalan utama desa/ kelurahan; • Penerangan di jalan utama desa/ kelurahan, listrik diusahakan pemerintah; • Penerangan di jalan utama desa/ kelurahan (listrik diusahakan non pemerintah).
<ul style="list-style-type: none"> • Keterjangkauan 		<ul style="list-style-type: none"> • Bahan Bakar untuk memasak yang digunakan sebagian besar keluarga (gas kota, LPG, minyak tanah, kayu bakar); • Keluarga tanpa listrik; • Tidak ada penerangan di jalan utama desa/kelurahan.
<ul style="list-style-type: none"> • Keberlanjutan 		<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga pengguna listrik PLN • Penerangan di jalan utama desa/ kelurahan (listrik diusahakan non pemerintah)
<ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas 		<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) kabupaten/kota.

Hasil Analisis Tematik Ketahanan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur

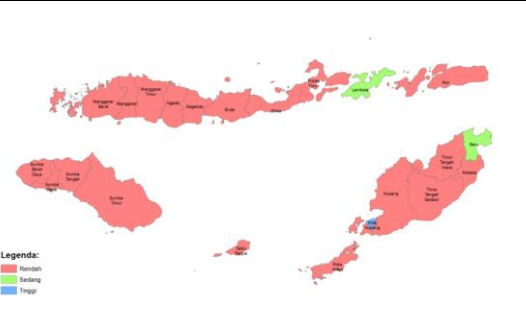


No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Ketahanan Energi
01.	Alor	Rendah	Prioritas 1	<p>RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK</p> <p>KETAHANAN ENERGI</p> <p>KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI</p> <p>NUSA TENGGARA TIMUR</p> <p>DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI</p> <p>KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS,</p> <p>RELATIF</p> <p>RENDAH</p> <p>RENDAH : 15 KABUPATEN/KOTA</p> <p>SEDANG : 6 KABUPATEN/KOTA</p> <p>TINGGI : 1 KABUPATEN/KOTA</p>
02.	Ende			
03.	Flores Timur			
04.	Malaka			
05.	Manggarai			
06.	Manggarai Barat			
07.	Manggarai Timur			
08.	Nagekeo			
09.	Ngada			
10.	Sikka			
11.	Sumba Barat Daya			
12.	Sumba Tengah			
13.	Sumba Timur			
14.	Timor Tengah Selatan			
15.	Timor Tengah Utara			
16.	Belu	Sedang	Prioritas 2	
17.	Kupang			
18.	Lembata			
19.	Rote Ndao			
20.	Sabu Raijua			
21.	Sumba Barat			
22.	Kota Kupang	Tinggi	Prioritas 3	
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Ketersediaan - Tematik Ketahanan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Ketersediaan - Tematik Ketahanan Energi	
01. 02. 03. 04. 05. 06.	Manggarai Manggarai Timur Sumba Tengah Sumba Timur Timor Tengah Selatan Timor Tengah Utara	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimnya ketersediaan jaringan listrik PLN di beberapa wilayah permukiman penduduk; • Minimnya ketersediaan lampu penerangan di beberapa jalan utama. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Ketahanan energi. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jaringan distribusi listrik PLN yang dapat menjangkau permukiman penduduk; - Pemasangan lampu penerangan di jalan utama. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; - PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) - Persero; - Pemerintah Daerah. 	
07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.	Flores Timur Alor Belu Ende Lembata Malaka Manggarai Barat Nagekeo Ngada Rote Ndao Sabu Raijua Sikka Sumba Barat Sumba Barat Daya	Sedang	Prioritas 2		
21. 22.	Kupang Kota Kupang	Tinggi	Prioritas 3		
<p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>					
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.					Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Aksesibilitas - Tematik Ketahanan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Aksesibilitas - Tematik Ketahanan Energi
01.	Alor	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sulitnya masyarakat mengakses listrik PLN, karena keterbatasan layanan sambungan listrik PLN; <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Ketahanan energi. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan layanan listrik PLN; Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) - Persero; Pemerintah Daerah.
02.	Ende			
03.	Flores Timur			
04.	Kupang			
05.	Malaka			
06.	Manggarai			
07.	Manggarai Barat			
08.	Manggarai Timur			
09.	Nagekeo			
10.	Ngada			
11.	Rote Ndao			
12.	Sabu Raijua			
13.	Sikka			
14.	Sumba Barat			
15.	Sumba Barat Daya			
16.	Sumba Tengah			
17.	Sumba Timur			
18.	Timor Tengah Selatan			
19.	Timor Tengah Utara			
20.	Lembata	Sedang	Prioritas 2	
21.	Belu			
22.	Kota Kupang	Tinggi	Prioritas 3	
 <p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

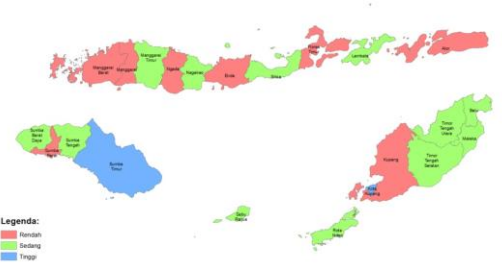
Hasil Analisis Kategori Keterjangkauan - Tematik Ketahanan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keterjangkauan - Tematik Ketahanan Energi
01.	Ende	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat rumah tangga yang menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar utama untuk memasak. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Ketahanan energi. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi penggunaan LPG dan bahan bakar efektif dan efisien untuk masyarakat. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Pemerintah Daerah.
02.	Flores Timur			
03.	Sikka			
04.	Alor	Sedang	Prioritas 2	
05.	Belu			
06.	Lembata			
07.	Malaka			
08.	Manggarai			
09.	Manggarai Barat			
10.	Manggarai Timur			
11.	Nagekeo			
12.	Ngada			
13.	Rote Ndao			
14.	Sabu Raijua			
15.	Sumba Barat			
16.	Sumba Barat Daya			
17.	Sumba Tengah			
18.	Sumba Timur			
19.	Timor Tengah Selatan			
20.	Timor Tengah Utara			
21.	Kupang	Tinggi	Prioritas 3	
22.	Kota Kupang			

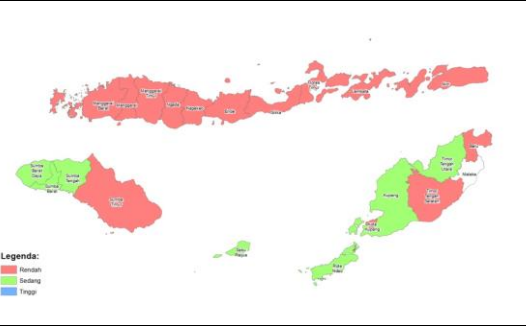
Legenda:
■ Rendah
■ Sedang
■ Tinggi

Sumber: Diolah dari berbagai sumber. Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keberlanjutan - Tematik Ketahanan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keberlanjutan - Tematik Ketahanan Energi
01.	Alor	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Beberapa kebutuhan energi listriknya terbantu dari supply non-PLN namun masih belum mencukupi seluruh kebutuhan energi. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Ketahanan energi. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Mendorong pengembangan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh pihak swasta, untuk memenuhi kebutuhan energi listrik. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Swasta; Pemerintah Daerah.
02.	Ende			
03.	Flores Timur			
04.	Kupang			
05.	Manggarai			
06.	Manggarai Barat			
07.	Ngada			
08.	Sumba Tengah	Sedang	Prioritas 2	
09.	Belu			
10.	Lembata			
11.	Malaka			
12.	Manggarai Timur			
13.	Nagekeo			
14.	Rote Ndao			
15.	Sabu Raijua			
16.	Sikka			
17.	Sumba Barat			
18.	Sumba Barat Daya			
19.	Timor Tengah Selatan			
20.	Timor Tengah Utara			
21.	Sumba Timur	Tinggi	Prioritas 3	
22.	Kota Kupang			
 <p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Stabilitas - Tematik Ketahanan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Stabilitas - Tematik Ketahanan Energi
01.	Alor	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks resiko bencana di beberapa kabupaten/kota relatif tinggi. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Mitigasi bencana. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan dan pengurangan risiko bencana; - Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana; - Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanggulangnya bila terjadi bencana; - Pemasangan sistem peringatan dini; - Pembentukan desa tangguh bencana; - Peningkatan sosialisasi informasi kebencanaan (budaya sadar bencana); - Mempersiapkan jalur evakuasi bila terjadi bencana. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); - Pemerintah Daerah.
02.	Belu			
03.	Ende			
04.	Flores Timur			
05.	Kupang			
06.	Lembata			
07.	Malaka			
08.	Manggarai			
09.	Manggarai Barat			
10.	Manggarai Timur			
11.	Nagekeo			
12.	Ngada			
13.	Sikka			
14.	Sumba Timur			
15.	Timor Tengah Selatan			
16.	Rote Ndao	Sedang	Prioritas 2	
17.	Sabu Raijua			
18.	Sumba Barat			
19.	Sumba Barat Daya			
20.	Sumba Tengah			
21.	Timor Tengah Utara			
22.	Kota Kupang			
 <p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

4.7

Tematik:

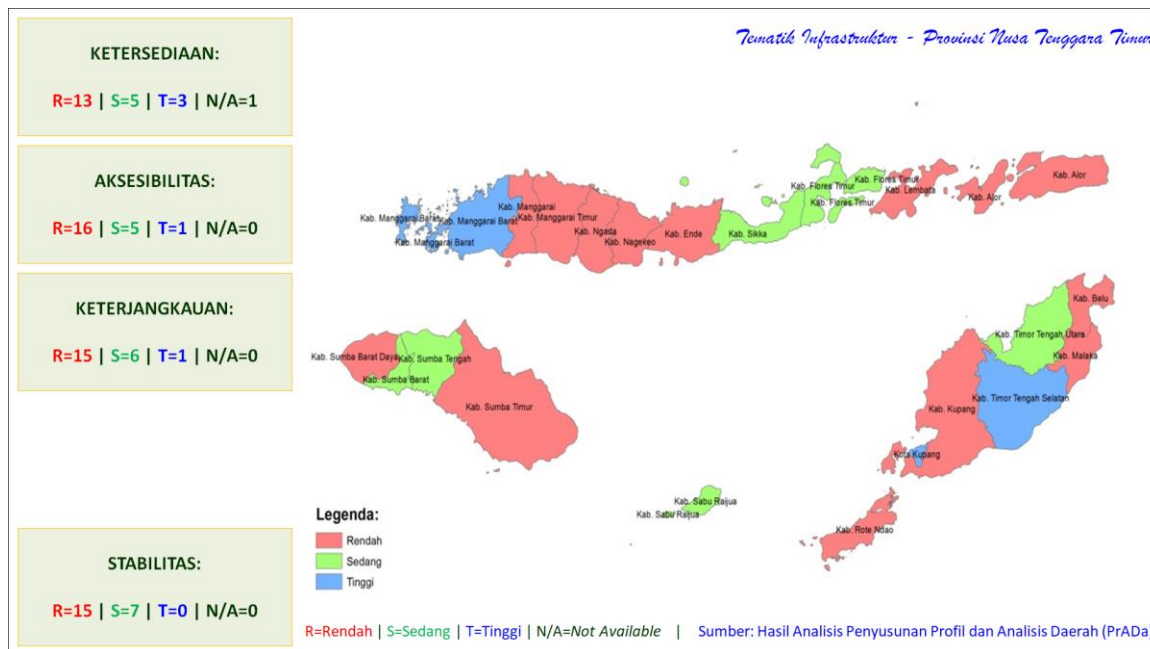
Infrastruktur

Provinsi Nusa Tenggara Timur



Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Infrastruktur Provinsi Nusa Tenggara Timur		
Kategori	Komponen	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan 		<ul style="list-style-type: none"> • Panjang ruas jalan provinsi; • Rasio irigasi; • Frekuensi kapal datang; • Frekuensi kapal GT.
<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas 		<ul style="list-style-type: none"> • Rasio jalan mantab provinsi; • Penumpang berangkat; • Penumpang tiba.
<ul style="list-style-type: none"> • Keterjangkauan 		<ul style="list-style-type: none"> • Presentase anggaran belanja infrastruktur terhadap dana APBD kabupaten/kota.
<ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas 		<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) kabupaten/kota.

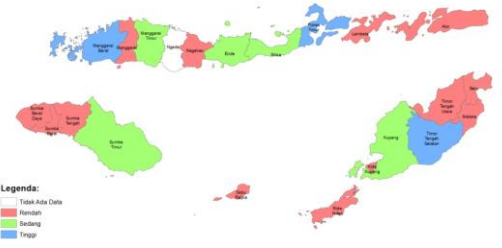
Hasil Analisis Tematik Infrastruktur Provinsi Nusa Tenggara Timur



No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Infrastruktur
01.	Alor	Rendah	Prioritas 1	<p style="text-align: center;">RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK</p> <p style="text-align: center;">INFRASTRUKTUR</p> <p style="text-align: center;">KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI</p> <p style="text-align: center;">NUSA TENGGARA TIMUR</p> <p style="text-align: center;">DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI</p> <p style="text-align: center;">KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS, RELATIF</p> <p style="text-align: center;">RENDAH</p> <p style="text-align: center;">RENDAH : 13 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">SEDANG : 6 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">TINGGI : 3 KABUPATEN/KOTA</p>
02.	Kab. Belu			
03.	Ende			
04.	Kupang			
05.	Lembata			
06.	Malaka			
07.	Manggarai			
08.	Manggarai Timur			
09.	Nagekeo			
10.	Ngada			
11.	Rote Ndao			
12.	Sumba Barat Daya			
13.	Sumba Timur			
14.	Flares Timur	Sedang	Prioritas 2	
15.	Sabu Raijua			
16.	Kab. Sikka			
17.	Sumba Barat			
18.	Sumba Tengah			
19.	Timor Tengah Utara			
20.	Kota Kupang	Tinggi	Prioritas 3	
21.	Manggarai Barat			
22.	Timor Tengah Selatan			

Sumber: Diolah dari berbagai sumber. Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)


Hasil Analisis Kategori Ketersediaan - Tematik Infrastruktur Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Ketersediaan - Tematik Infrastruktur		
01.	Ngada	N/A	-			
02.	Alor	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tingginya kerusakan alat transportasi darat; Tingginya persentase jalan dengan permukaan tanah, kerikil dan batuan yang diperkeras; Terbatasnya jaringan telekomunikasi untuk akses informasi, khususnya di perdesaan dan daerah terpencil; Terbatasnya sarana pendukung dermaga; Belum terintegrasinya pelabuhan-pelabuhan strategis yang ada; Terbatasnya sarana pendukung di sebagian besar dermaga. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas jalan; Peningkatan akses telekomunikasi; Pengembangan transportasi darat/laut. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas jalan beraspal; Pengembangan sistem telekomunikasi; Penyediaan dan peningkatan prasarana dan sarana penunjang pelabuhan dan dermaga. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Pemerintah Daerah. 		
03.	Kab. Belu					
04.	Lembata					
05.	Malaka					
06.	Manggarai					
07.	Nagekeo					
08.	Rote Ndao					
09.	Sabu Raijua					
10.	Sumba Barat					
11.	Sumba Barat Daya					
12.	Sumba Tengah					
13.	Timor Tengah Utara					
14.	Kota Kupang					
15.	Ende				Sedang	Prioritas 2
16.	Kupang					
17.	Manggarai Timur					
18.	Kab. Sikka					
19.	Sumba Timur					
20.	Flaes Timur	Tinggi	Prioritas 3			
21.	Manggarai Barat					
22.	Timor Tengah Selatan					
 <p>Legenda: ■ Tidak Ada Data ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>						
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.					Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)	

Hasil Analisis Kategori Aksesibilitas - Tematik Infrastruktur Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Aksesibilitas - Tematik Infrastruktur
01.	Malaka	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Waktu tempuh cukup lama karena terkendala beberapa ruas jalan mengalami kerusakan dan belum dilakukan perbaikan; Rendahnya kondisi jalan mantab. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan pemeliharaan jalan. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas jalan dan perluasan kemantapan jalan beraspal. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; Pemerintah Daerah.
02.	Alor			
03.	Ende			
04.	Flaes Timur			
05.	Kupang			
06.	Lembata			
07.	Manggarai			
08.	Manggarai Timur			
09.	Nagekeo			
10.	Ngada			
11.	Rote Ndao			
12.	Sabu Raijua			
13.	Sumba Barat Daya			
14.	Sumba Tengah			
15.	Sumba Timur			
16.	Timor Tengah Selatan			
17.	Kab. Belu	Sedang	Prioritas 2	
18.	Manggarai Barat			
19.	Kab. Sikka			
20.	Sumba Barat			
21.	Timor Tengah Utara			
22.	Kota Kupang	Tinggi	Prioritas 3	
<p>Legenda: ■ Tidak Ada Data ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keterjangkauan - Tematik Infrastruktur Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keterjangkauan - Tematik Infrastruktur
01.	Alor	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disparitas harga bahan bakar yang cukup tinggi antarpulau; • Biaya transportasi yang cukup mahal. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan sosial bagi masyarakat miskin. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Subsidi energi bagi masyarakat miskin; - Penyediaan transportasi publik bagi masyarakat miskin. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; - Kementerian Sosial; - Kementerian Perhubungan; - Pemerintah Daerah.
02.	Kab. Belu			
03.	Ende			
04.	Flaes Timur			
05.	Kupang			
06.	Kota Kupang			
07.	Malaka			
08.	Manggarai			
09.	Manggarai Timur			
10.	Rote Ndao			
11.	Kab. Sikka			
12.	Sumba Barat Daya			
13.	Sumba Timur			
14.	Timor Tengah Utara			
15.	Sumba Barat			
16.	Lembata	Sedang	Prioritas 2	
17.	Manggarai Barat			
18.	Nagekeo			
19.	Sabu Raijua			
20.	Sumba Tengah			
21.	Timor Tengah Selatan			
22.	Ngada	Tinggi	Prioritas 3	
 <p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Stabilitas - Tematik Infrastruktur Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Stabilitas - Tematik Infrastruktur
01.	Alor	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks resiko bencana di beberapa kabupaten/kota relatif tinggi. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Mitigasi bencana. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan dan pengurangan risiko bencana; - Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana; - Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanggulangnya bila terjadi bencana; - Pemasangan sistem peringatan dini; - Pembentukan desa tangguh bencana; - Peningkatan sosialisasi informasi kebencanaan (budaya sadar bencana); - Mempersiapkan jalur evakuasi bila terjadi bencana. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); - Pemerintah Daerah.
02.	Kab. Belu			
03.	Ende			
04.	Flaes Timur			
05.	Kupang			
06.	Lembata			
07.	Malaka			
08.	Manggarai			
09.	Manggarai Barat			
10.	Manggarai Timur			
11.	Nagekeo			
12.	Ngada			
13.	Kab.Sikka			
14.	SumbaTimur			
15.	Timor Tengah Selatan			
16.	Kota Kupang	Sedang	Prioritas 2	
17.	Rote Ndao			
18.	Sabu Raijua			
19.	Sumba Barat			
20.	Sumba Barat Daya			
21.	Sumba Tengah			
22.	Timor Tengah Utara			
<p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

4.8

Tematik:

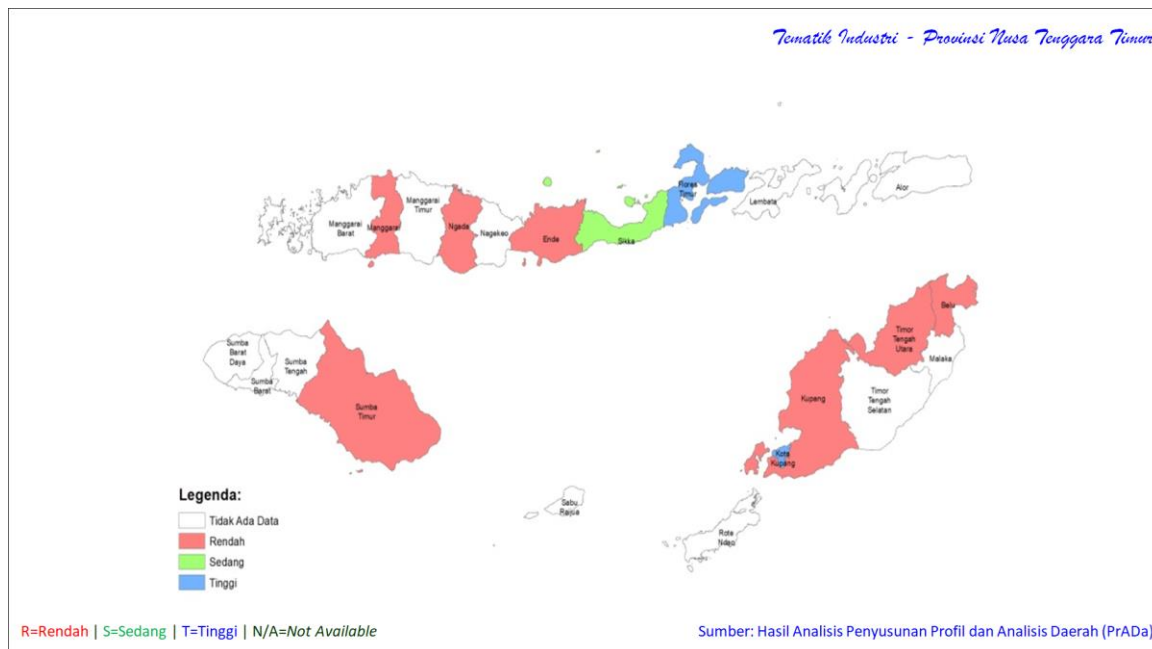
Industri, Pariwisata, dan Sektor Unggulan

Provinsi Nusa Tenggara Timur



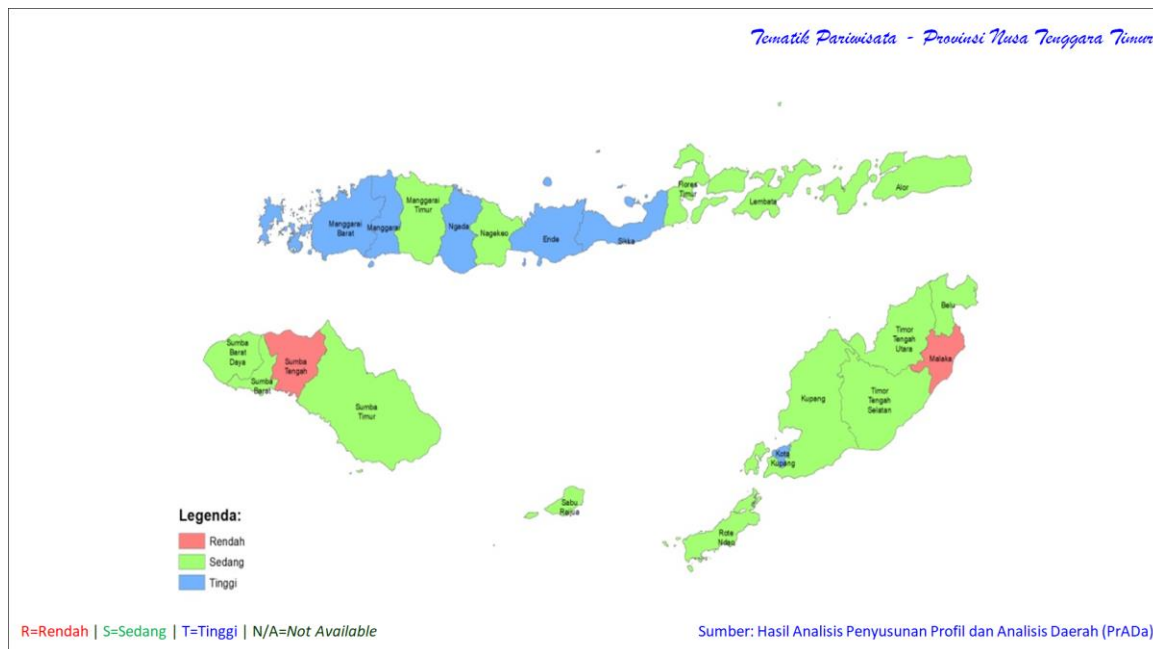
Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Industri dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur		
Kategori	Komponen	Indikator
● Industri		<ul style="list-style-type: none">● Jumlah tenaga kerja;● Nilai investasi;● Nilai produksi.
● Pariwisata		<ul style="list-style-type: none">● Akomodasi;● Jumlah kamar;● Jumlah tempat tidur;● Jumlah restoran;● Jumlah objek wisata.

Hasil Analisis Tematik Industri Provinsi Nusa Tenggara Timur



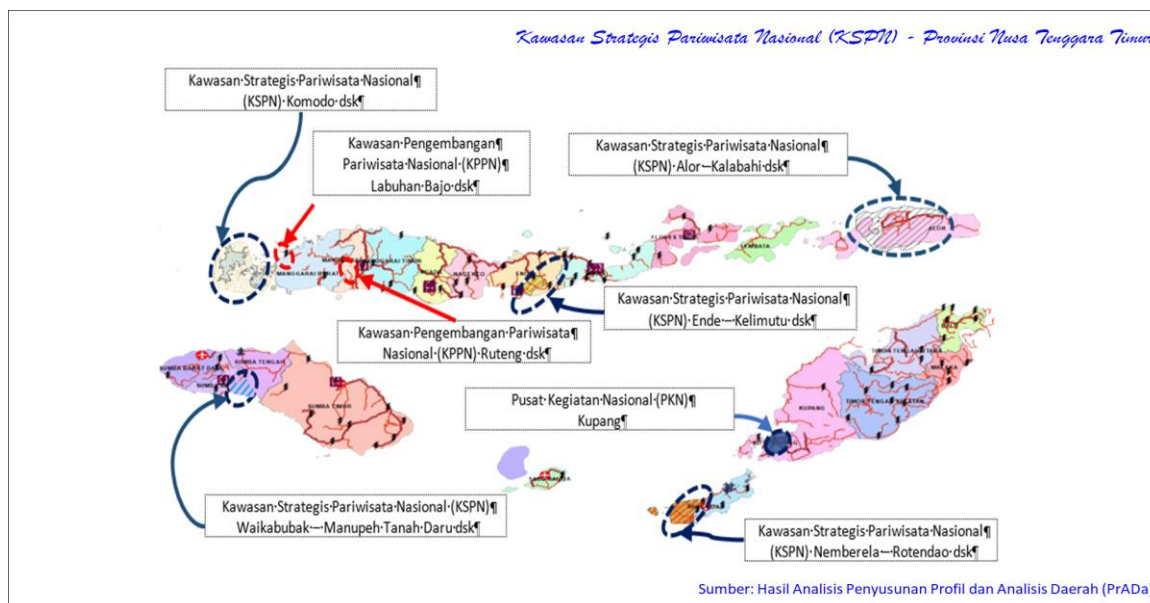
No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Industri
01.	Alor	N/A	-	<p style="text-align: center;">RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK</p> <p style="text-align: center;">INDUSTRI</p> <p style="text-align: center;">KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI</p> <p style="text-align: center;">NUSA TENGGARA TIMUR</p> <p style="text-align: center;">DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS, RELATIF</p> <p style="text-align: center;">RENDAH</p> <p style="text-align: center;">RENDAH : 7 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">SEDANG : 1 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">TINGGI : 2 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai investasi dan produksi di Ngada lebih tinggi jika dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerjanya. • Industri terkendala pada keterbatasan energi, manajemen pengelolaan, dan kelembagaan yang menyebabkan beberapa industri berhenti beroperasi.
02.	Lembata	N/A	-	
03.	Malaka	N/A	-	
04.	Manggarai Barat	N/A	-	
05.	Manggarai Timur	N/A	-	
06.	Nagekeo	N/A	-	
07.	Rote Ndao	N/A	-	
08.	Sabu Raijua	N/A	-	
09.	Sumba Barat	N/A	-	
10.	Sumba Barat Daya	N/A	-	
11.	Sumba Tengah	N/A	-	
12.	Timor Tengah Selatan	N/A	-	
13.	Belu	Rendah	Prioritas 1	
14.	Ende			
15.	Kupang			
16.	Manggarai			
17.	Ngada			
18.	Sumba Timur	Sedang	Prioritas 2	
19.	Timor Tengah Utara			
20.	Sikka			
21.	Flores Timur	Tinggi	Prioritas 3	
22.	Kota Kupang			
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Tematik Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur



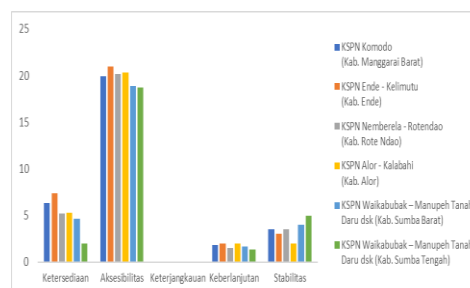
No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Pariwisata
01.	Malaka	Rendah	Prioritas 1	<p style="text-align: center;">RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK</p> <p style="text-align: center;">PARIWISATA</p> <p style="text-align: center;">KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI</p> <p style="text-align: center;">NUSA TENGGARA TIMUR</p> <p style="text-align: center;">DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI</p> <p style="text-align: center;">KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN,</p> <p style="text-align: center;">KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS,</p> <p style="text-align: center;">RELATIF</p> <p style="text-align: center;">SEDANG</p> <p style="text-align: center;">RENDAH : 2 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">SEDANG : 14 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">TINGGI : 6 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Alor memiliki potensi wisata bahari, namun akomodasi yang tersedia sangat terbatas. Pariwisata di kabupaten Manggarai Barat sangat potensial karena adanya KSPN Komodo dan destinasi prioritas Labuan Bajo, yang masih memerlukan dukungan infrastruktur penunjang kepariwisataan lainnya.
02.	Sumba Tengah	Rendah	Prioritas 1	
03.	Alor	Sedang	Prioritas 2	
04.	Belu			
05.	Flores Timur			
06.	Kupang			
07.	Lembata			
08.	Manggarai Timur			
09.	Nagekeo			
10.	Rote Ndao			
11.	Sabu Raijua			
12.	Sumba Barat			
13.	Sumba Barat Daya			
14.	Sumba Timur			
15.	Timor Tengah Selatan			
16.	Timor Tengah Utara			
17.	Ende	Tinggi	Prioritas 3	
18.	Manggarai			
19.	Manggarai Barat			
20.	Ngada			
21.	Sikka			
22.	Kota Kupang			
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Provinsi Nusa Tenggara Timur



Permasalahan Utama Pengembangan KSPN Provinsi Nusa Tenggara Timur:

- 1 Ketersediaan akomodasi hotel pada umumnya hanya berada di pusat kota. Sementara destinasi wisata di NTT berada jauh dari pusat kota;
- 2 Terdapat wilayah KSPN yang merupakan hutan lindung sehingga diperlukan pertimbangan dalam pengembangannya;
- 3 Belum adanya transportasi umum serta jalan akses menuju objek wisata;
- 4 Belum adanya regulasi daerah yang mengatur standar tarif dan pengintegrasian antar objek wisata;
- 5 Minimumnya aksesibilitas pada transportasi laut karena penyediaan hanya dari masyarakat dan tanpa adanya regulasi.
- 6 Kawasan strategis dengan skor paling tinggi yaitu KSPN Ende-Kelimutu di Kabupaten Ende, karena didukung oleh kategori ketersediaan, aksesibilitas, dan keberlanjutan yang tinggi;
- 7 Kawasan strategis yang memiliki skor paling rendah adalah KSPN Waikabubak-Manueh Tanah Daru di kabupaten Sumba Tengah. Seluruh kategori kecuali stabilitas memiliki nilai paling rendah diantara daerah lainnya.
- 8 Pengembangan KSPN Waikabubak-Manueh Tanah Daru perlu menjadi prioritas diikuti dengan pengembangan wilayahnya di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah. Kawasan strategis lainnya juga perlu menjadi prioritas karena rendah di kategori lainnya seperti KSPN Alor-Kalabahi di Kabupaten Alor.



Sektor Unggulan³ Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sektor potensial penopang perekonomian provinsi Nusa Tenggara Timur adalah pertanian, perkebunan dan juga pariwisata. Hal ini terlihat dari makin berkembangnya minat investor swasta menanamkan modal di bidang pertanian, perkebunan dan pariwisata, yang juga ditopang oleh meningkatnya investasi infrastruktur oleh pemerintah dalam rangka mengejar ketertinggalan dengan daerah lain.

Pertumbuhan investasi masih tetap didominasi oleh investasi pemerintah seperti kelanjutan pembangunan fisik Bendungan Napun Gete dan Rotiklot, prospek dimulainya pembangunan Bendungan Temef, peningkatan jaringan kelistrikan, pelabuhan, bandara dan jalan raya. Sementara investasi swasta diperkirakan terutama masih pada bidang-bidang seperti ketenagalistrikan, hotel berbintang, perumahan dan kelanjutan pengembangan agroindustri perkebunan dan pertanian.

3 Kajian Ekonomi Regional, Bank Indonesia.

5.1. Kesimpulan

Mengacu kepada hasil analisis, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bab-4 Profil dan Analisis Daerah (PrADa) tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian tematik RATA-RATA kabupaten/kota di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

- ① Pendidikan, tingkat capaian RENDAH hingga SEDANG;
- ② Kesehatan, tingkat capaian SEDANG;
- ③ Penanggulangan Kemiskinan, tingkat capaian SEDANG;
- ④ Perumahan dan Permukiman, tingkat capaian RENDAH;
- ⑤ Ketahanan Pangan, tingkat capaian RENDAH hingga SEDANG;
- ⑥ Ketahanan Energi, tingkat capaian RENDAH;
- ⑦ Infrastruktur, tingkat capaian RENDAH;
- ⑧ Industri, tingkat capaian RENDAH; dan Pariwisata, tingkat capaian SEDANG;

5.2. Rekomendasi

Profil dan Analisis Daerah (PrADa) ini, oleh para pemangku kepentingan dapat digunakan sebagai salah satu masukan untuk mempertajam dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang berbasis kewilayahan, utamanya dalam rangka menyusun program/kegiatan sesuai dengan isu atau permasalahan daerah, sebagaimana yang telah diuraikan dan disajikan di dalam Bab-4 Profil dan Analisis Daerah (PrADa) provinsi Nusa Tenggara Timur ini.

Metode analisis yang dipergunakan dalam penyusunan PrADa ini, melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Metode analisis ini relatif baru dan belum memiliki banyak referensi yang dapat digunakan, utamanya dalam rangka merumuskan program/kegiatan sesuai dengan isu atau permasalahan daerah. Oleh karenanya penerapan metode THIS dalam penyusunan PrADa ini, dapat dipergunakan sebagai salah satu instrumen dalam rangka mempersiapkan penyusunan *background study* RPJMN 2020-2024, yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.